

# **KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERBAIKAN JALAN PROVINSI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh :  
PUTRI JAYANTI  
NIM. 105190026**

**Pembimbing:  
Dr. Rahmi Hidayati, S. Ag., M. HI  
Ananda Putri Rohima, S. Sos., MPA**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1445 H/ 2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar strata (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia sanksi yang berlaku di UIN STS JAMBI Jambi.

Jambi, Juli 2023  
ikan  
  
**Putri Javanti**  
**NIM. 105190026**

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbaikan Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 27 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Suta Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

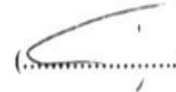
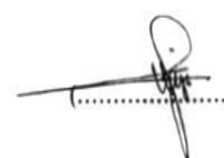

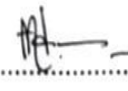
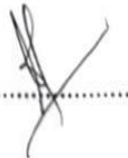

Jambi, 2023

Mengesahkan:



Dr. Sarudin S. Ag., M.H  
NIP. 197301022000031005

### Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Alhusni, M.HI  
NIP.197612272009011011 
2. Sekretaris Sidang : Dra. Choirivah  
NIP. 196605081994032001 
3. Pembimbing I : Dr. Rahmi Hidayati, M.HI  
NIP. 197112201992032001 
4. Pembimbing II : Ananda Putri Rohima, MPA  
NIP. 199109282020122011 
5. Penguji I : Wenny Dastina, S.Sos., M.Si  
NIP.197801092005012006 
6. Penguji II : Ifitiah Utami, M.Sy  
NIP. 199102222020122013 

## MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ  
وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا  
دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. (Q.S Al-Isra (17):7).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

## P E R S E M B A H A N

Sujud syukur kupersembahkan pada ALLAH yang maha kuasa, berkat dan rahmat, detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsiku pada orang-orang tersayang:

Yang pertama, untuk kedua orang tuaku Ayah yang bernama (Jahroman), Ibuku bernama (Dian Kasiti) yang tidak pernah lelah dalam membimbing dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Serta memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya ucapan terima kasih tidak akan cukup untuk membalas kebaikan orang tua karena itu terimalah persembahan bukti dan cintaku untuk kalian dan kepada Abangku (Rudi Yansah) dan Kakak iparku (Dede Hertika Sari) yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tinggi untuk keberhasilan ini, dan keponakan ku (Arsen Erdian Zahro), dan (Dhafa Maulana) tercinta, yang selalu menghiburku dan memberikan tawa kasih sayang untuku. Serta untuk keluarga besarku terima kasih atas dukungan, doa serta kasih sayang yang telah kalian berikan untukku selama mengejar pencapaian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## ABSTRAK

**Nama** : Putri Jayanti  
**Nim** : 105190026  
**Judul** : Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbaikan Jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah terhadap perbaikan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Ibu Kota Provinsi dengan Ibu Kota Kabupaten, atau antar Ibu kota Kabupaten dan jalan strategis Provinsi. Penelitian ini bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Jenis penelitian ini deskriptif analitik yaitu penelitian lapangan seperti melihat langsung kondisi jalan Provinsi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa yang *pertama* kondisi jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang melebihi kapasitas dan ketika hujan jalan sangat licin menyebabkan kendaraan terhambat, *kedua* Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbaikan Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur cukup memadai. Adapun rencana Perbaikan Jalan pada ruas jalan desa Simpang Berbak – Simpang Jembatan Muara Sabak. *Ketiga* faktor pendukung dan penghambat perbaikan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Faktor yang menjadi Kendala Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melakukan perbaikan infrastruktur jalan yaitu Keterbatasan Dana, Keterbatasan Sarana Dan Prasarana, dan Letak Geografis. Faktor pendukung dari perbaikan jalan yaitu partisipasi masyarakat dan pengguna jalan terhadap pembangunan infrastruktur jalan.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pemerintah, Perbaikan, Jalan.

## ABSTRACT

**Name** : Putri Jayanti  
**Name** : 105190026  
**Title** : **Government Policy on Provincial Road Improvement in East Tanjung Jabung Regency**

This thesis aims to determine the implementation of government policies for the improvement of provincial roads in East Tanjung Jabung Regency in 2023. Policies are a series of concepts and basic plans in carrying out a job, leadership and ways of acting. Provincial roads are collector roads in the primary road network system that connect provincial capitals to regency capitals, or between district capitals and provincial strategic roads. This research took place at the Public Works and Public Housing Office of Jambi Province. This type of research is descriptive analytic, namely field research such as seeing directly the condition of provincial roads in East Tanjung Jabung Regency. The results of the study show that first, the condition of provincial roads in East Tanjung Jabung Regency is still damaged caused by vehicles that exceed capacity and when it rains the roads are very slippery causing vehicles to be hampered, secondly, the Implementation of Government Policy for Road Repair in East Tanjung Jabung Regency is quite adequate. As for the Road Improvement plan on the Simpang Berbak village road – Muara Sabak Bridge Intersection. The three factors supporting and inhibiting road repair in East Tanjung Jabung Regency are Factors that are Obstacles to the Government of the Public Works and Public Housing Service in carrying out road infrastructure improvements, namely Limited Funds, Limited Facilities and Infrastructure, and Geographical Location. Supporting factors for road repair are community participation and road users in the development of road infrastructure.

**Keywords: Policy, Government, Improvements, Roads.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbaikan Jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur"** Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan dan dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW pembawa risalah pencerah bagi manusia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu kami menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Su'aidi Asy'ari, MA,. Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan I, II, III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M. HI dan Ibu Ananda Putri Rohima, S.sos., M.PA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

7. Kepada teman teman seperjuanganku di angkatan 2019, terutama lokal A prodi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan kenangan dalam dunia perkuliahan.

8. Bapak dan Ibu serta seluruh pegawai kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang meluangkan waktu untuk menjadi informan penulisan skripsi ini.

9. Serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, saya sadari juga bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya saya harapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikirannya demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt kita semua memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya.

Jambi, Juli 2023

Penulis



Putri Jayanti  
NIM.105190026

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	20
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b> .....	<b>23</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	23
B. Pendekatan Penelitian.....	23
C. Jenis dan Sumber Data .....	24
D. Unit Analisis.....	25
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftho Jambi

F.Teknik Analisis Data.....	28
G.Sistematika Penulisan.....	30
H.Jadwal Penelitian .....	31

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... 32**

A.Sejarah Dinas PUPR .....	32
B.Tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR .....	35
C.Visi dan misi Dinas PUPR.....	36
D.Susunan organisasi Dinas PUPR .....	37
E.Tugas dan Fungsi Bidang bina marga.....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 46**

<b>1. Kondisi jalan Provinsi di Kabupaten TJT .....</b>	<b>46</b>
<b>2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbaikan Jalan Provinsi Di Kabupaten TJT .....</b>	<b>56</b>
a.Perumusan kebijakan .....	57
b.Implementasi kebijakan .....	58
c.Evaluasi dan pemantauan kebijakan .....	62
<b>3. Faktor pendukung dan penghambat perbaikan jalan Provinsi di Kabupaten TJT.....</b>	<b>64</b>
a.Faktor pendukung .....	64
b.Faktor penghambat .....	69

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
<b>A.Kesimpulan .....</b>	<b>73</b>
<b>B.Saran .....</b>	<b>74</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**CURRICULUM VITAE**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

Tabel 1: Kondisi Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....55

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.....	37
---	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

UIN	: Universitas Islam Negeri
Covid-19	: Corona Virus Desiase 2019
DAK	: Dana Alokasi Khusus
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
TJ	: Tanjung Jabung Timur
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
PUPR	: Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
ALKAL	: Peralatan dan Perbekalan
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
RENSTRA	: Rencana Strategis
KM	: Kilo Meter

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dibawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Ibu Kota Provinsi dengan Ibu Kota Kabupaten, atau antar Ibu kota Kabupaten dan jalan strategis Provinsi. Jalan Provinsi digunakan untuk melayani kendaraan dengan jarak perjalanan sedang dan berkecepatan lebih dari 40 km per jam. Lebar badan jalannya 7 meter, dengan kapasitas jalan lebih besar maupun sama dengan volume lalu lintas rata rata<sup>1</sup>.

Menurut UU 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 15 Ayat (1) disebutkan bahwa Kewenangan Pemerintahan Negara bertanggung jawab atas pembangunan jalan dan pengelolaan jalan. Selain itu, Ayat (2) menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), bertanggung jawab atas peraturan, pedoman, dan perluasan jalan.

---

<sup>1</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.



Pengelolaan jalan meliputi administrasi jalan Kabupaten dan jalur Desa<sup>2</sup>. Jalan adalah salah satu dari sekian banyak proyek internasional yang didanai Pemerintah Daerah. Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat berfokus pada pemeliharaan jalan, perbaikan jalan, dan pembangunan jalan. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, berjudul "Perhubungan dan Angkutan Pasal 24", jalan rusak dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas untuk itu penyelenggaraan jalan harus segera dilakukan<sup>3</sup>.

Adapun tugas Pemerintah sebagai pengelola jalan adalah sebagai berikut: tercatat dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (1) Pemerintah menyediakan dan/atau meningkatkan pengaturan, sarana, dan prasarana transportasi lalu lintas adalah penyebab kecelakaan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal (2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk penanganan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas<sup>4</sup>. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mendirikan Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah sesuai standar nasional lebar badan jalan 7 meter namun masih ada beberapa titik yang belum dilakukan perbaikan<sup>5</sup>. Kerusakan jalan terparah berada di kilometer jalan Kota Muara Sabak Timur menuju Desa Siau Dalam, Lambur I, sampai menuju Kecamatan Rantau Rasau. Setiap harinya terjadinya kemacetan

<sup>2</sup> Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 15 Ayat 1 Dan 2.

<sup>3</sup> Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan , Pasal 16 ayat 1.

<sup>4</sup> Undang Undang no 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 239.

<sup>5</sup><https://ampkompascom.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/properti/read/2022/04/07/170000221/mudik-ke-jambi-begini-kualitas-jalan-nasional-menuju-muara-sabak?> Diakses 4 November 2022 Jam 09.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kendaraan roda empat sepanjang 2 kilometer. Butuh waktu waktu berjam-jam lamanya untuk melewati ruas tersebut<sup>6</sup>.

Kerusakan jalan lokal yang terjadi didaerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah permasalahan yang sering kali terjadi dan dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna jalan seperti terjadi kemacetan, jarak tempuh yang lama, dan kecelakaan lalu lintas yang dapat menghambat pekerjaan karena jalan dipakai untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan bidang lainnya. Pemeliharaan jalan harus menjadi priritas untuk dikembangkan dalam pelaksanaan dan perencanaan karena begitu banyak manfaat dari jalan. Banyak kritik yang ditujukan kepada Instansi Pemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan Penanganan dan Pengelolaan Jalan, agar semua persoalan terkait dapat terselesaikan. Selain itu, ada berbagai masalah jalan utama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kerusakan, seperti berlebihan beban kendaraan, genangan air di jalan yang tidak dapat mengalir akibat drainase yang tidak baik, dan lalu lintas kelebihan beban yang sering terjadi menyebabkan umur pakai jalan menjadi lebih pendek dari yang dibutuhkan. Minimnya biaya pemeliharaan, keterlambatan anggaran dan prioritas penanganan yang kurang baik saat ini juga termasuk penyebab. Panas dan suhu udara, air hujan, dan mutu awal produk jalan yang buruk juga tampaknya mempengaruhi kualitas jalan.<sup>7</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

<sup>6</sup> <https://jambilink.com/macet-parah-di-jalan-provinsi-muara-sabak-rantau-rasau/> Diakses 7 Maret 2022 Jam 19.00.

<sup>7</sup> <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10854/BAB1.pdf?sequence=5&isAllowed=y> Diakses pada tgl 15 Mei 2022 Jam 19.00 WIB.

Oleh karena itu, pemeliharaan dan perencanaan jalan harus disesuaikan secara sistematis untuk memastikan kondisi jalan optimal dan konsisten dengan yang telah rencanakan. Kondisi jalan perlu dilakukan survei struktural dan non-struktural (fungsional) untuk memeriksa kekasaran, kerataan, dan kekesatan tekstur. Karena ruas jalan memiliki banyak kerusakan yang dapat menyebabkan terganggunya kenyamanan pengguna jalan<sup>8</sup>. Dalam hal ini, kerusakan jalan terjadi sebelum masa akhir umur jalan dan kerusakan-kerusakan yang timbul tidak ditentukan oleh satu faktor melainkan gabungan dari suatu faktor yang masih relevan. Oleh sebab itu, kerusakan kecil dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Selain itu, kerusakan jalan dapat menyebabkan biaya pemeliharaan yang besar, karena jika dibiarkan porsi anggaran infrastruktur akan terserap dalam pemeliharaan. Hal ini terjadi karena proses dilakukan dengan melihat kerusakan fisik terhadap kerusakan dan tidak mengevaluasi lebih lanjut mengenai faktor lain yang harus diwaspadai agar kerusakan yang sama tidak terjadi<sup>9</sup>. Perbaikan dan pelebaran jalan dilakukan, dengan bantuan alat berat melakukan pematatan dan perataan pada badan jalan dan bahu jalan. Namun karena banyaknya jalan yang masih terdapat kerusakan sehingga perbaikan belum maksimal dan masih terdapat beberapa titik jalan yang tidak rata serta aspal yang kasar dan kesat<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Suwardo dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 18, Nomor 2, Agustus 2020 hal (295-306).

<sup>9</sup> Munggarani, Nurrela Arifah Dan Wibowo Andreas. 2017. "Kajian Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Dini Perkerasan Jalan Lentur Dan Pengaruhnya Terhadap Biaya Penanganan" Dalam Jurnal Infrastruktur Vol 3, Nomor 1 (Hal 1 Dan 2) Parahyangan: Universitas Katolik Parahyangan.

<sup>10</sup> <https://jambi-antaranewscom.cdn.ampproject.org/v/s/jambi.antaranews.com/amp/berita/327747/melintasi-jalan-jambi-muarasabak-bisa-sedikit-dikebut> Di akses 6 november 2022 jam 10:00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Menurut hasil wawancara kepada narasumber yang menggunakan jalan sebagai sumber ekonomi yaitu supir travel di jalan Provinsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jalan rusak terjadi karena banyaknya kendaraan berat dengan muatan melebihi kapasitas jalan seperti truk pengangkut buah kelapa sawit. Selain itu jalan jalan rusak juga menghambat pengemudi yang sering melakukan perjalanan ke kota Jambi, dampak dari kemacetan panjang dan terhambatnya transportasi mengakibatkan kurangnya pemasukan ekonomi bagi sebagian pengguna jalan<sup>11</sup>.

Pemerintah Daerah sudah melakukan perbaikan jalan Provinsi di beberapa titik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun masih ada wilayah yang belum diperbaiki, sehingga berdampak kepada masyarakat terutama mobil travel, mobil truk yang membawa angkutan sawit, dan kendaraan lainnya yang dipakai sebagai alat untuk mengangkut barang untuk dijual. Akibatnya sering terjadi kecelakaan karena jalan yang masih banyak lubang dan terjadi kemacetan panjang ketika hujan karena jalan sangat licin. Oleh karena Pemerintah Daerah harus memperhatikan akses agar muatan berat tidak terjadi kendala dan memperbaiki jalan rusak tersebut agar tidak terjadi kemacetan, dan kecelakaan karena masyarakat dominan dengan pekerjaan sawit dimana bagus buruknya jalan dapat mempengaruhi hasil keuangan di tempat tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengambil penelitian yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbaikan Jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur”**

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Jaylani selaku supir travel di jalan Provinsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 27 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi





## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka rumusan masalah yang akan terpengaruh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah dalam perbaikan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat perbaikan jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

## C. Batasan masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang akan dibahas dan menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya, maka penulis memberikan batasan ini hanya membahas “Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbaikan Jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur” Pada Tahun 2023.

## D. Tujuan dan kegunaan penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan apa yang ingin dicapai peneliti.

Tujuan ini penulis klasifikasikan dari dua unsur yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, pertama bersifat umum yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana kondisi jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah dalam perbaikan jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat perbaikan jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kedua yaitu Tujuan khusus dari penelitian yang penulis lakukan ini merupakan syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) pada jurusan ilmu pemerintahan fakultas syariah UIN STS JAMBI.

## 2. Kegunaan penelitian

Penelitian mengenai kebijakan Pemerintah terhadap perbaikan jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa dan sebagai pengetahuan dan pengalaman bagi penulis mengenai kebijakan Pemerintah terhadap perbaikan jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Menambah wawasan dan ilmu bagi penulis dan memberikan dukungan terhadap teori teori yang ada serta menjadi bahan bacaan untuk Mahasiswa Dan Dosen Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Pemerintahan.
3. Selain sebagai alat untuk menilai kualitas karya tulis dan acuannya, juga dapat menjadi acuan bagi karya yang sudah pernah dikerjakan.

## E. Kerangka teori

Untuk memastikan bahwa proposal ini berhasil, penulis menggunakan kerangka teoritis sebagai teori penggunaan dasar untuk membangun suatu rancangan yang kuat untuk pelaksanaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 1. Kebijakan Publik

### a) Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik, menurut Thomas R. Dye, adalah apapun pilihannya Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Pemerintah harus menentukan apakah ingin melakukan atau tidak<sup>12</sup>. Berikut ini dari artikel Thomas Dye: kebijakan publik dibuat oleh Pemerintah, bukan organisasi pribadi. Selain itu, publik membahas keputusan yang harus dibangun atau tidak oleh Pemerintah, atau jika Pemerintah tahu ada jalan rusak dan tidak memberikan tanggapan bagaimana memperbaikinya, Pemerintah akan memberikan umpan balik di lokasi. Menurut definisi di atas, Pemerintah bertanggung jawab atas beberapa hal, termasuk infrastruktur jalan. Namun, Pemerintah tidak bertanggung jawab untuk mereplikasi kualitas jalan di setiap wilayah peruntukannya. Akibatnya, Pemerintah menerapkan kebijakan jika mengidentifikasi dan mengimplementasikan kebijakan melalui Infrastruktur jalan dan peningkatan perencanaan dan kebijakan perencanaan dan mendukung diperlukannya penelitian untuk melengkapi informasi dan sumber yang mungkin diperlukan. Berikut ini adalah taktik yang akan digunakan dalam pelaksanaan kepentingan publik yaitu: Agenda, implementasi kebijakan, legitimasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan kebijakan semua termasuk. Fase-fase dilakukan dengan cara

<sup>12</sup> Budi winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: media press indo,2007), hal 16-17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



yang sama, yang berarti bahwa proses dilakukan untuk mencapai tujuan.<sup>13</sup>.

#### b) Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan Publik disebut sebagai penerapan atau pelaksanaan, menurut pengertian implementasi publik dalam Kamus Webster Solichin Abdul Wahab<sup>14</sup>. Isu-isu yang harus ditangani oleh Pemerintah adalah isu-isu publik: nilai-nilai yang direalisasikan, kebutuhan, atau peluang. Masalah-masalah ini dapat diidentifikasi, tetapi hanya dapat diselesaikan melalui tindakan publik, yaitu kebijakan publik. Suatu pendekatan holistik yang melihat pemecahan masalah sebagai suatu keseluruhan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan atau terputus, karena selain saling ketergantungan (dependence), karakteristik publik yang dituju juga bersifat dinamis. "Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah bahwa kebijakan publik adalah masalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah<sup>15</sup>.

Tachyan menyimpulkan bahwa kebijakan publik secara umum terdiri dari tiga hal pokok: implementasi kebijakan, perumusan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 32-34.

<sup>14</sup> Solichin Abdul Wahab, *Evaluasi Kebijakan Publik*. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang, 2019.

<sup>15</sup> Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada Univers

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





implementasi, formulasi, dan evaluasi. Ketiga aktivitas politik utama tersebut bersifat kausal dan memiliki pola atau siklus yang berkesinambungan hingga isu publik atau tujuan tertentu tercapai. Implementasi kebijakan merupakan tahap kunci dalam proses kebijakan publik. Tahap implementasi suatu kebijakan tidak dimulai sampai tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu oleh perumusan kebijakan. Oleh karena itu, fase implementasi kebijakan hanya terjadi setelah Undang-Undang diundangkan dan dana telah dialokasikan untuk mendanai implementasi kebijakan. Kebijakan publik tidak ada artinya tanpa tindakan nyata yang dilakukan dalam program, kegiatan proyek<sup>16</sup>.

Struktur program dapat mencakup tujuan, standar, prosedur, anggaran, metode dan kebijakan. Sebuah rencana yang komprehensif telah diuraikan dan diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Program menggambarkan tujuan, kebijakan, anggaran, metode, standar, dan prosedur Merancang program seputar detail tugas, mengembangkan tujuan yang jelas, menetapkan indikator kinerja utama yang jelas, serta waktu dan biaya. Implementasi program (aplikasi) dengan menggunakan struktur dan personel, pendanaan dan sumber daya lainnya, prosedur dan metode yang sesuai. Membangun sistem sarana perencanaan, dan pemantauan serta evaluasi atau hasil implementasi kebijakan yang efektif<sup>17</sup>.

### 1) Indikator Implementasi Kebijakan Publik

<sup>16</sup> Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Aipi Puslit KP2W Lemlit UNPAD.

<sup>17</sup> H. Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Truen RTH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Indikator implementasi kebijakan publik adalah ukuran kualitatif atau kuantitatif untuk menggambarkan tingkat suatu sasaran tercapai serta tujuan yang di tetapkan. Purwanto dan Sulistyastuti menjelaskan bahwa peneliti harus melakukan evaluasi kinerja untuk membenarkan implementasi yang gagal atau berhasil. Indikator merupakan alat penting untuk menilai kemampuan kebijakan yang akan dilaksanakan. Indikator memungkinkan peneliti untuk memahami keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, program, atau proyek. Jadi kebijakan atau program yang akan dibahas adalah indikator yang baik, tetapi jelas mencerminkan kebenaran kebijakan suatu program. Indikator yang digunakan secara holistik adalah tepat dalam arti sepenuhnya menggambarkan tingkat pencapaian tujuan kebijakan. Tidak ada cara pasti untuk menyatakan jumlah indikator yang digunakan untuk mengukur realitas kebijakan publik yang dievaluasi<sup>18</sup>. Purwanto dan Sulistyastuti menetapkan empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kondisi di mana implementasi berlangsung.

1. Suatu kebijakan mutu tidak akan berhasil jika diimplementasikan dalam keadaan dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif bagi upaya pencapaian tujuan.
2. Dukungan dan koordinasi yang baik dengan organisasi pemerintah pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>18</sup> Purwanto, Erwan Agus, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. 2012, Gava Media Press Yogyakarta.

3. Sumber daya. Artinya, sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana untuk mendukung pelaksanaan implementasi secara lokal dan dalam suatu organisasi.
4. Sifat badan eksekutif, yaitu kemampuannya untuk melaksanakan penegakan yang dipercayakan kepadanya, serta tugas dan fungsi badan eksekutif itu sendiri.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang sukses memerlukan proses review implementasi sebagai sistem review implementasi kebijakan yang teratur untuk mendukung keberhasilan implementasi. Proses evaluasi dilakukan dengan membandingkan implementasi kebijakan dengan standar yang telah ditetapkan atau dengan membandingkan implementasi kebijakan dengan kondisi lokal<sup>19</sup>. Indikator dari implementasi kebijakan publik terhadap jalan yaitu mengevaluasi kegiatan kegiatan yang menerapkan prinsip-prinsip pada pembangunan atau peningkatan jalan. Oleh karena itu pembangunan jalan tidak mengganggu budaya lokal, aspek sosial, dan tetap terjangkau ekonomis serta tidak mengganggu lingkungan<sup>20</sup>.

Dalam indikator implementasi kebijakan publik terdapat Implementing agency adalah instansi atau organisasi pemerintah maupun swasta yang diberi wewenang dalam menjalankan implementasi kebijakan, dalam pelaksanaannya institusi atau organisasi tersebut memiliki keselarasan visi dan misi dengan implementasi yang dilaksanakannya dan sesuai dengan

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 90.

<sup>20</sup> Jurnal HPJI "Penetapan Indikator Jalan Berkelanjutan" Vol. 5 No. 2 Juli 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



fungsi dan tugas dari instansi atau organisasi tersebut. Meskipun implementing agency yang terlibat dalam implementasi kebijakan public bias sangat beragam, akan tetapi birokrasi sampai saat ini memiliki posisi yang paling dominan dibandingkan organisasi lainnya. Birokrasi masih menjadi tulang punggung bagi tercapainya berbagai tujuan kebijakan publik sebagaimana telah disebutkan. Sebagai tulang punggung dalam implementasi kebijakan, keberhasilan birokrasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi tersebut, Argumen ini dikemukakan oleh Amstrong di kutip Purwanto dan Sulistyastuti sebagaimana dikutip dalam paragraph berikut (kapasitas organisasi adalah kapasitas organisasi untuk berfungsi secara efektif. Ini adalah tentang kemampuannya untuk menjamin levas kinerja yang tinggi, mencapai tujuannya (berkelanjutan keunggulan kompetitif dalam bisnis komersial), deliver result dan yang penting, memenuhi kebutuhan stakeholder). Purwanto dan Sulistyastuti mendefinisikan kapasitas organisasi sebagai suatu kesatuan unsure organisasi yang melibatkan :

- (1) struktur
- (2) Mekanisme kerja atau koordinasi antar unit dalam implmentasi
- (3) sumberdaya manusia yang ada dalam organisasi,
- (4) dukungan financial serta sumber daya yang dibutuhkan organisasi tersebut untuk bekerja. Agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik, makan kapasitas organisasi yang melinatkan keempat unsur tersebut harus dalam kondisi optimal yang saling mendukung antara satu sama lain, yaitu: desain struktur organisasi yang tepat. Ketepatan tersebut dapat dilihat sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

keseuaian antara misi yang harus dicapai dengan karekteristik lingkungan tugas dimana organisasi tersebut bekerja sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi sebagai implementor<sup>21</sup>.

Kemudian kemampuan sumberdaya manusia harus memenuhi kebutuhan organisasi seperti : knowledge, skill serta personality yang baik. Tidak kalah penting adalah kecukupan sumber daya financial untuk menajalankan aktivitasaktivitas dalam proses implementasi. Ketepatan serta kecukupan unsure-unsur yang berkaitan denagn terbentuknya kapasitas organisasi akan sangat mempengaruhi kualita organisasi implementor. Elemen kaulitas organisasi tersebut yang selanjutnya akan menentukan bagaimana orgniasasi pengimplementasi ini ammapu menjalakan perannya secara baik. Purwanto dan Sulistyastuti mengidentifikasi unsur-unsur kapasitas organisasi, anatara lain :

1. Kemampuan untuk menjembatani berbagai kepentingan
2. Kapasitas untk menggalangkan dan menjaga dukungan
3. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap tugas-tugas yang baru dan memiliki suatu frame work untuk melakukan proses pembelajaran
4. Kemampuanuntuk mengenali perubahan lingkungan
5. Kemampuan untuk melakukan advoaksi dan lobby
6. Memiliki kemampuan untuk memonitoring dan mengendalikan implementasi

<sup>21</sup> Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



7. Memiliki kemampuan mekanisme koordinasi yang baik
8. Memiliki mekanisme untuk memonitor dampak dari kebijakan<sup>22</sup>.

## 2. Infrastruktur Jalan

Infrastruktur secara umum meliputi fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai pelayanan publik untuk mendorong aktivitas sosial maupun ekonomi suatu masyarakat. Infrastruktur perlu disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana infrastruktur bekerja sama dengan pihak swasta dalam rangka menunjang aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat seperti pelabuhan, jalan, jembatan, kesehatan dan lain lain<sup>23</sup>. Jalan adalah prasarana transportasi darat berupa: segala sesuatu yang menutupi semua bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perangkat yang ditujukan untuk lalu lintas pembangunan jalan bukan hanya upaya untuk memperbaiki tata kelola ruang perkotaan, namun pembangunan jalan memiliki keunggulan antara lain: sebagai berikut :1) Untuk mempermudah akses lalu lintas.2) Mengurangi kemacetan.3) Antisipasi kecelakaan.

### 1) Klasifikasi jalan

Jalan terdiri dari jalan umum dan jalan umum cara spesial. Jalan khusus tidak dimaksudkan untuk lalu lintas umum untuk mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan. jalan umum dikelompokkan berdasarkan sistem,

<sup>22</sup> Ibid, hal 129.

<sup>23</sup> Nss, Rr Lulus Prapti, dkk "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang." Jurnal Dinamika Sosial Budaya, (2015) hal 82-103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



kelas, status dan fungsi. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem jaringan jalan, terdiri atas: pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder Ini adalah: Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peran distribusi barang dan jasa untuk pembangunan seluruh wilayah di tingkat Nasional dengan menghubungkan semua simpul pelayanan distribusi pusat kegiatan. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peran distribusi barang dan jasa untuk orang-orang di perkotaan<sup>24</sup>.

#### a) Status Jalan Berdasarkan Administrasi Pemerintahan

1. Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang melayani pengumpul atau pembagi transportasi dengan properti perjalanan jarak jauh sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah input terbatas.
2. Jalan Lokal adalah jalan umum yang melayani transportasi lokal dengan karakteristik transportasi lokal, kecepatanrata-ratanya rendah dan jumlah inputnya tidak terbatas.
3. Jalan Lingkungan berfungsi sebagai jalan umum melayani lalu lintas ramah lingkungan dengan karakteristik lalu lintas lokal, dan kecepatan rata-rata rendah<sup>25</sup>
4. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor internal sistem jaringan jalan utama yang menghubungkan kota-kota besar jalan dan jalan tol strategis Provinsi dan Nasional.

<sup>24</sup> Undang Undang nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan.

<sup>25</sup> Undang Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 8 Ayat 2,3,4 Dan 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



5. Jalan Negara adalah jalan kolektif dalam sistem jaringan jalan utama yang menghubungkan ibu Kota Provinsi dengan ibu Kota Kabupaten atau antar ibu kota Kabupaten dan jalan provinsi yang strategis.
6. Jalan Provinsi adalah jalan yang menghubungkan ibu Kota Provinsi dengan ibu kota Kabupaten atau Kota dalam suatu Provinsi tersebut
7. Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam jaringan jalan koneksi utama ibu kota Kabupaten dengan ibu Kota Kecamatan, antar ibu kota Kecamatan, ibu kota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, pusat kegiatan antar daerah serta jalan umum di jaringan jalan sekunder dalam Kabupaten, dan jalan Kabupaten yang strategis.
8. Jalan Kota merupakan jalan umum dalam jaringan jalan sekunder menghubungkan pusat-pusat layanan di dalam Kota, Hubungan pusat pelayanan dengan persil (perkebunan dan perumahan) dan antar pusat pemukiman di Kota.
9. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman dalam Desa serta jalan lingkungan<sup>26</sup>.
  - b) Status Jalan Berdasarkan Fungsi
    - 1) Jalan lingkungan – ruas jalan umum untuk kendaraan dengan jarak tempuh dekat dan berkecepatan rendah.
    - 2) Jalan lokal – jalanan selebar lebih dari 5 meter untuk melayani kendaraan berjarak tempuh dekat berkecepatan lebih dari 40 km/jam.

<sup>26</sup> Undang Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 9 Ayat 2,3,4,5 Dan 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





- 3) Jalan kolektor – ruas jalan selebar lebih dari 7 meter untuk dilewati kendaraan dengan jarak tempuh sedang dan berjalan di kecepatan lebih dari 40 km/jam. Kapasitas jalan kolektor lumayan besar dengan lalu lintas rata-rata. Ada dua jenis jalan kolektor, yaitu jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder.
- 4) Jalan kolektor primer yang menghubungkan pusat kegiatan nasional, wilayah, lokal, hingga lingkungan. Sementara itu, jalan kolektor sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat perkotaan.
- 5) Jalan arteri – jalan arteri fungsinya menampung perjalanan angkutan utama dengan jarak tempuh jauh. Kecepatan yang diperbolehkan di jalan arteri mencapai 60 km/jam dan lebih. Karena lebar ruas jalannya bisa mencapai lebih dari 8 meter, maka kapasitas jalan arteri sangat besar dengan volume lalu lintas rata-rata. Jenis jalan arteri terbagi dua, yaitu jalan arteri primer dan sekunder.
  - c) Status Jalan Berdasarkan Muatan Sumbu
    - 1) Kelas I – ruas jalan arteri boleh dilewati kendaraan bermotor, dengan ukuran muatan lebar tidak lebih dari 2500 mm, panjang kurang dari atau sama dengan 1800 mm, dan berat lebih dari 10 ton.
    - 2) Kelas II – jalan arteri untuk kendaraan dengan muatan lebar tidak lebih dari 2500 mm, panjang kurang dari dan sama dengan 1800 mm, serta berat maksimal barang yang diangkut adalah 10 ton.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- 3) Kelas III A – jalan arteri dan kolektor untuk kendaraan bermuatan lebar kurang dari dan sama dengan 2500 mm, panjang tidak lebih dari 1800 mm, dan berat maksimal 8 ton.
- 4) Kelas III B – jalan kolektor untuk kendaraan bermotor dengan muatan lebar tidak melebihi 2500 mm, panjang tidak lebih dari 1200 mm, dan berat maksimal muatannya adalah 8 ton.
- 5) Kelas III C – jalan lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan dengan muatan lebar tidak lebih dari 2100 mm, panjang maksimal 900 mm, dan batas berat muatan 8 ton<sup>27</sup>.

## 2) Peran Jalan

Peran jalan menurut Pasal 5 UU No. 38 2004 atas jalan sebagai berikut: sebuah. Jalan sebagai bagian dari infrastruktur transportasi berperan penting dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, ekologi, Pertahanan dan Keamanan, dan Politik serta digunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi obat mujarab kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jalan yang merupakan kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembangunan jalan peraturan pengelolaan jalan bertujuan untuk:

- a) Ketertiban dan kepastian hukum dalam mewujudkan pekerjaan pemeliharaan jalan;

<sup>27</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b) Mengakui peran masyarakat dalam pengelolaan jalan;
- c) Melaksanakan peran penyelenggara jalan secara optimal
- d) Memberikan pelayanan kepada masyarakat
- e) Terwujudnya pelayanan jalan yang andal, prima dan tidak memihak untuk kepentingan umum;
- f) Terwujudnya jaringan jalan yang efisien dan sukses untuk mendukung penerapan sistem transportasi yang terintegrasi;
- g) Terwujudnya perusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka<sup>28</sup>.

## F. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah referensi sebagai tolak ukur dan acuan untuk melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu membantu untuk mempermudah penulis dalam menentukan langkah langkah yang sistematis untuk menyusun penelitian ini dari segi teori maupun konsep. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada permasalahan dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini membahas bagaimana kebijakan Pemerintah terhadap perbaikan jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedangkan penelitian lainnya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Suprianto Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Ilmu Politik yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Dikecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Tahun

<sup>28</sup> Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 5.

2012” menjelaskan bahwa kebijakan Pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor mengalami keterlambatan dalam pengalokasian dana anggaran sehingga kebijakan pengalokasian dana anggaran dan pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan berdasarkan alokasi anggaran tersebut adanya keterlambatan dalam pembangunan yang dilakukan Pemerintah serta adanya masalah politik anggaran yang dilakukan oknum dilembaga eksekutif.<sup>29</sup>

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Wahyu Suprianto adalah objeknya yaitu kebijakan Pemerintah dan jalan sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan pembangunan jalan. Penelitian yang dilakukan Wahyu Suprianto yaitu kebijakan Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor sedangkan penelitian ini Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbaikan Jalan Provinsi Dikabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Penelitian yang dilakukan Nindy Adriani Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Ekonomi Syariah yang berjudul “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Perbaikan Jalan Jalan Raya Pasar Pringsewu Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar Dalam Ekonomi Islam” menjelaskan adanya pembangunan infrastruktur perbaikan jalan merupakan salah satu pembangunan untuk menata kondisi jalan disebuah pasar yang berhubungan dengan sebuah pusat perbelanjaan sedangkan

<sup>29</sup> Wahyu Suprianto, Skripsi: “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor”. Skripsi Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sosial ekonomi masyarakat mayoritas pedagang dalam mencari rejeki disebuah pasar. Hasil penelitian menjelaskan pengaruh pembangunan infrastuktur perbaikan jalan raya pasar pringsewu berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat sekitar yang berjualan dan membuka usaha dipinggiran jalan raya pasar khususnya pada pendapatan masyarakat<sup>30</sup>.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Nindy Ardiani adalah objeknya yaitu perbaikan jalan sedangkan perbedaan terdapat pada lokasi dan tujuan penelitian penelitian yang dilakukan Nindi Ardiani yaitu pengaruh pembangunan infrastuktur perbaikan jalan raya pasar pringsewu terhadap ekonomi masyarakat sedangkan penelitian ini yaitu Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbaikan Jalan Provinsi Dikabupaten Tanjung Jabung Timur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>30</sup> Nindy Adriani, Skripsi: “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Perbaikan Jalan Jalan Raya Pasar Pringsewu Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar Dalam Ekonomi Islam”, Skripsi Mahasiswi Uin Raden Intan Lampung, 2019.

## BAB II

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan dengan ditetapkannya lokasi dalam penelitian akan lebih mudah mengetahui tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Tempat penulis meneliti kasus ini di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

##### 2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan April 2023 hingga bulan Juni 2023.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistik dan deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada konsep khusus dengan memanfaatkan metode alamiah<sup>31</sup>. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang bersifat deskriptik analitik yaitu dimana memaparkan serta menggambarkan

<sup>31</sup> Angki Aulia Muhammad, 2013 Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat Universitas Pendidikan Indonesia.

fenomena dan keadaan mengenai situasi yang terjadi di jalan Provinsi Kecamatan Tanjung Jabung Timur.

### C. Jenis dan Sumber data

#### 1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang merupakan data bukan angka. Data kualitatif dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Umumnya data kualitatif dituangkan dalam bentuk perkata-kata. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang bersifat deskriptik analitik yaitu dimana memaparkan serta menggambarkan fenomena dan keadaan mengenai situasi yang terjadi di jalan Provinsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder:

##### a) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya<sup>32</sup>. Data ini disebut data asli, adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah riset lapangan melakukan observasi dan wawancara seperti melakukan wawancara dengan informan yang memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah terhadap perbaikan jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

##### b) Data sekunder

<sup>32</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara manual. Informasi bekas atau sumber lainnya tersedia sebelum penelitian. sumber data. Sumber-sumber sekunder ini meliputi komentar atau analisis ahli, interpretasi, artikel di surat kabar, buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, hasil survei. Catatan sejarah dan perpustakaan yang juga merupakan sumber data sekunder<sup>33</sup>. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen atau arsip yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

#### D. Unit analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Unit analisis dapat berupa organisasi, baik pemerintah maupun swasta atau sekelompok orang<sup>34</sup>. Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu cara pengambilan sampel dengan pertimbangan informasi. Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian yaitu orang yang di wawancarai, diminta informasi oleh peneliti dan diperkirakan orang yang menjadi informan ini menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian<sup>35</sup>.

<sup>33</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Hal 291.

<sup>34</sup> Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, ©2012), Hal 62.

<sup>35</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* hal 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





## E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari fakta penelitian. Adapun alat yang digunakan yaitu;

### 1. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang langsung tanpa mengamati Perantara suatu objek untuk melihat dari dekat aktivitas atau Fenomena yang dilakukan oleh objek tertentu. Sugiyono menyatakan bahwa “pengamatan dasar dari semua ilmu”. Peneliti hanya dapat bekerja atas dasar data, yaitu fakta tentang dunia nyata yang diperoleh melalui observasi<sup>36</sup>. Metode ini digunakan untuk melihat secara langsung keadaan lapangan agar memperoleh gambaran yang lebih luas dari permasalahan yang diteliti. Jenis pengamatan peneliti dalam kegiatan yang bersangkutan dengan situasi peneliti sendiri dan memperoleh informasi melalui wawancara dengan pengguna jalan dan Kepala Seksi Penyelenggaraan Jalan dan Kepala Seksi Bidang Bina Program di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang berlangsung secara langsung penelitian yang sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan beberapa orang sebagai responden untuk

<sup>36</sup> Angki Aulia Muhammad, 2013 Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat Universitas Pendidikan Indonesia hal 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





mendapatkan banyak informasi terkait dengan masalah yang diteliti dan hasil percakapan yang direkam oleh Pewawancara<sup>37</sup>. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pemahaman yang terkait dengan penelitian mereka diantaranya yaitu:

1. Kepala Seksi penyelenggaraan jalan wilayah I Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
2. Kepala Seksi penyelenggaraan jalan wilayah II Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
3. Kepala Seksi bidang bina program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
4. Pengguna jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu:
  - a) Supir travel
  - b) Supir PS
  - c) Supir Mobil
  - d) Pengendara motor
  - e) Masyarakat sekitar

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang telah berlalu pada saat itu Lakukan penelitian. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data melalui penggunaan melihat atau merekam laporan yang sudah tersedia<sup>38</sup>. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa dokumen baik tertulis maupun yang dipakai untuk bukti atau keterangan penulis dalam

<sup>37</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Bandung*: Reflika Aditama 2010, Hal 312.

<sup>38</sup> *Ibid* hal 92

penelitian. Data yang di maksud adalah data yang terkait dengan Kebijakan Pemerintah terhadap perbaikan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tiga teknik yaitu mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data data yang telah ada rekamannya kemudian disimpulkan dengan tujuan mempermudah peneliti dalam memilih data yang sesuai untuk dianalisis. Data yang telah dianalisis kemudian dicantumkan dengan cara terpisah data data yang serupa kepada bagian tertentu. Selanjutnya membuat ringkasan dari setiap aspek yang diteliti. Langkah akhir yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah dikumpulkan sehingga penelitian dapat berlanjut dengan melihat kembali data data asli yang diperoleh<sup>39</sup>.

### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Menurut Sugiyono, “reduksi data berarti merangkul, memilih hal-hal penting, berkonsentrasi pada hal-hal penting, mencari topik dan pola”. Reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman peneliti pada data yang dikumpulkan dari hasil penelitian. peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan responden serta informasi lainnya terkait kebijakan pemerintah dalam perbaikan

<sup>39</sup> Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, (2020), Hal 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



jalan provinsi yang akan memberikan data yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukannya pengumpulan data lebih lanjut dan mencarinya jika perlu.

## 2. Tampilan Data (Data Display)

Menurut Sugiyono, “dalam penelitian kualitatif, penyajian data hal ini dapat berupa deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya”. Melihat data membuatnya lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, rencanakan pekerjaan lebih lanjut atas dasar apa yang dipahami berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian Ini adalah studi kasus di Dinas PUPR Provinsi Jambi sehingga tampilan data yang dilakukan lebih detail ke dalam deskripsi.

## 3. Kesimpulan (verifikasi)

Menurut Sugiyono, Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan tersebut Masalah dirumuskan dari awal, tapi mungkin bukan karena Masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti aktif di lapangan. “Kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan dalam bentuk pernyataan singkat dan sederhana dan mudah dipahami”<sup>40</sup>.

## G. Sistematika Dalam Penulisan

Agar penulisan proposal ini tidak keluar dari pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan menjadi panduan

<sup>40</sup> Larasati, dkk, "Penyajian Data Komoditi Batik Kabupaten Sukoharjo dengan Google Earth." (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika), 2016, Hal 152-154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dalam penulisan skripsi dan menjadi ringkasan dari pembahasan yang ada di dalam setiap bab nya seperti berikut:

Bab 1, Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.

Bab 11, Membahas metode penelitian yang membahas tentang pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, unit analisis, dan sistematika penulisan.

Bab 111, Menjelaskan gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Bab IV, Pembahasan, dalam bab ini yaitu membahas tentang “Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbaikan Jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.

Bab V, Penutup, dalam hal ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran saran terkait dengan “Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbaikan Jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.

## H. Jadwal penelitian

Agar penelitian dan penulisan skripsi ini terencana dengan waktu efektif dan efisien sehingga bisa di selesaikan sesuai dengan tepat waktu, maka peneliti sudah seharusnya membagi langkah-langkah penelitian yang akan dijalani dalam bentuk jadwal untuk menjadi pedoman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



NO	Kegiatan	Tahun 2022- 2023																				
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																					
2	Pembuatan Proposal																					
3	Perbaikan Proposal dan Seminar																					
4	Surat Izin Riset																					
5	Pengumpulan data																					
6	Pengolahan dan Analisis Data																					
7	Pembuatan Laporan																					
8	Bimbingan dan Perbaikan																					
9	Agenda dan Ujian Skripsi																					
10	Perbaikan dan Penjilidan																					

@ Hak cipta milik UIN Sunthha Jambi  
Islamic University of Sunthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNTHHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

## BAB III

### GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda "Openbare Werken" yang pada zaman Hindia Belanda disebut "Waterstaat swerken". Di lingkungan Pusat Pemerintahan dibina oleh Dep. Van Verkeer & Waterstaat (Dep. V&W), yang sebelumnya terdiri dari 2 Dept. Van Guovernements Bedri jven dan Dept. Van Burgewrlijke Openbare Werken. Dep. V dan W dikepalai oleh seorang Direktur, yang membawahi beberapa Afdelingen dan Diensten sesuai dengan tugas/wewenang Depertemen ini. Yang meliputi bidang PU (openbare werken) termasuk afdeling Waterstaat, dengan onder afdelingen.: 1. Tanah gebouwen, 2. Wegen, 3. Irigasi & Assainering, 4. Air Kracht, 5. Membangun biro (untuk jembatan). Disamping yang tersebut di atas, yang meliputi bidang PU (Openbare Werken) juga afd. Havenwezen (Pelabuhan), afd. Electriciteitswezen (Kelistrikan) dan afd. Luchtvaart (Penerbangan Sipil). Organisasi PU (Open-bare werken) di daerah-daerah adalah sebagai berikut : Di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur urusan Waterstaat/openbare werken diserahkan kepada Pemerintahan Propinsi yang disebut : "Provinciale Waterstaatsdienst" dan dikepalai oleh seorang Hoofd Provinciale Waterstaatsdients (HPW) Diwilayah Gouv, Yogyakarta dan Gouv. Surakarta urusan-urusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pekerjaan Umum/Waterstaat dijalankan oleh "Sultanas Werken" (yogya) "Rijkswerken" (Surakarta), Mangkunegaranwerken". Disamping itu diwilayah Vorstenlander terdapat 3 organisasi "Waterschap", "s" Lands gebouwendienst, Regentschap Werken" dan " Gremeente werken" Untuk daerah luar jawa Gouv.Sumatera, Borneo (Kalimantan) dan Grote Oost (Indonesia Timur) terdapat organisasi "Gewestelijke Inspectie v/d Waterstaat" dikepalai oleh seorang Inspektur. Diwilayah Residentie terdapat "Residentie Water Staatsdienst" yang dahulu dikenal dengan nama "Dienst der BUSUR". dan kepala dinas ini biasa disebut "EAQ" (Eerst Aanwend Waterstaatsambtenar). Ketentuan yang dikeluarkan pada jaman Hindia Belanda untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pekerjaan Umum dapat dibaca dalam "AWR". 1936 BWR 1934 dan "WVO/WVV". Setelah Belanda menyerahkan dalam perang pasifik pada tahun 1942, kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatera dan Indonesia Timur dan tidak ada Pusat Pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ke 3 wilayah pemerintahan tersebut. Di bidang Pekerjaan Umum pada tiap-tiap wilayah organisasi Pemerintahan Militer Jepang tersebut diatas, diperlukan organisasi Jaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak Jepang, kantor pusat "V & W". di Bandung, dinamakan "Kotubu Bunsitsu", sejak saat itu istilah "Pekerjaan Oemoem" (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), "Pekerjaan Umum" (PU), disamping "Doboku" lazim dipergunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kotubu Bonsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan wilayah Pemerintahan di Jawa/Madura, hubungan dengan luar Jawa tidak ada. Organisasi Pekerjaan Umum di daerah-daerah, di Karesidenan-Karesidenan pada umumnya berdiri sendiri-sendiri. Sistem pelaksanaan pekerjaan ada yang mempergunakan sistem dan nama jaman Ned. Indie, disamping menurut sistem Jepang.

Setelah Indonesia memproklamkan Kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945, maka semenjak itu Pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun Pemerintahan Daerah-daerah. Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka pada Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V.&W. (dikenal dengan nama "Gedung Sate"). Belanda ingin mengembalikan kekuasaan pemerintahan di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti Tentara Sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain "Gedung Sate" yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa "3 Desember 1945"). Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintah Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



untuk selanjutnya ke Yogyakarta, begitu juga Kementerian PU. Sesudah Pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta, berpindah lagi ke Jakarta. Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami perubahan pimpinan dan organisasi, sesuai situasi politik pada waktu itu<sup>41</sup>.

### **B.Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat**

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

(1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Pasal 3 Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan

<sup>41</sup> <https://pu.go.id/page/Dari-Masa-ke-Masa> DI akses pada tanggal 18 April 2023, pukul 10.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perumahan rakyat; c. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya<sup>42</sup>.

### **C. Visi Dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat**

#### **VISI**

Terwujudnya Jambi lebih maju, aman dan nyaman, tertib, amanah, dan profesional di bawah ridho Allah SWT.

#### **MISI**

Memantapkan tata kelola pemerintahan

Memantapkan perekonomian masyarakat daerah

Memantapkan kualitas sumber daya manusia<sup>43</sup>.

### **D. Susunan Organisasi Dinas Pupr Provisi Jambi**

Berikut susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

(1) Susunan Organisasi Dinas yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang” yang ada di Dinas PUPR.

(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

<sup>42</sup> Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

<sup>43</sup> Dokumentasi di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada tgl 7 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang

1. Dilarang mengutip seba

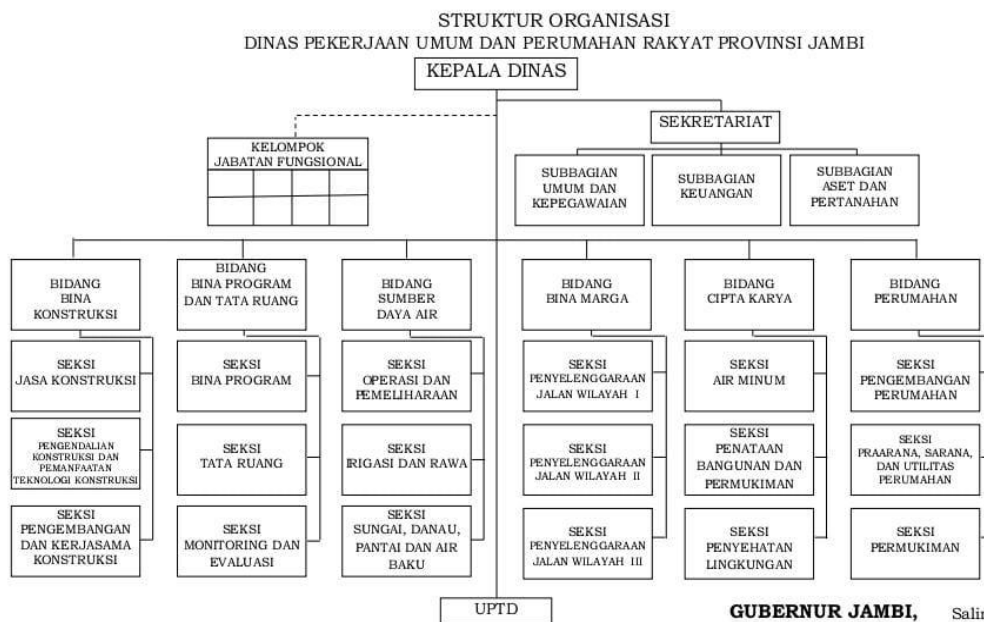
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pengajaran, penelitian, atau

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sebutkan sumber asli:

- (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang<sup>44</sup>.



**GUBERNUR JAMBI,**

ttd

**H. AL HARIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**M. ALI ZAINI, SH, MH**  
Nip. 19730729 200012 1 002

## E. Tugas dan fungsi Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang bina marga serta

<sup>44</sup> Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

pelayan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan Provinsi;
- b. penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan jalan dan jembatan Provinsi;
- c. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan jalan dan jembatan Provinsi;
- d. pengembangan dan penelitian mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan Provinsi;
- e. perumusan program dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
- f. perumusan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) bidang jalan dan jembatan;
- g. pengoordinasian, pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- h. perumusan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- i. pengendalian pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- j. pengendalian pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- k. pengendalian pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- l. pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- m. pengendalian penyusunan rencana teknis dan program kegiatan di bidang bina marga dalam wilayah Provinsi;
- n. pengendalian penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- o. pelaksanaan dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga bidang bina marga; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 28

Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah I mempunyai tugas:

- a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan Wilayah I;
- b. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- c. melaksanakan fasilitasi pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi, melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan, melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan di wilayah I;
- d. menyusun rencana teknik dan program kegiatan jalan dan jembatan wilayah I;
- e. menyusun rencana dan program pengembangan serta pembinaan teknik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Jalan dan jembatan wilayah I;
- f. menyusun rumusan rencana kebijakan teknis dan penyusunan program pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan wilayah I;
- h. menyusun dan mengembangkan standar dokumen pengadaan;
- i. melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP bidang bina marga;
- j. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dalam penyusunan program;
- k. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pembangunan jalan dan jembatan wilayah I;
- l. menyesuaikan kontrak pekerjaan konstruksi dan preservasi jalan dan jembatan wilayah I;
- m. menyusun Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang jalan dan jembatan wilayah I;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- n. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi dan audit keselamatan jalan dan jembatan wilayah I;
- o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, jalan bebas hambatan dalam wilayah I Provinsi;
- p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam wilayah I Provinsi;
- q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam wilayah I Provinsi;
- r. melaksanakan preservasi jalan dan jembatan wilayah I;
- s. menyiapkan bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan dan jembatan wilayah I;
- t. melaksanakan pengamanan, pemanfaatan bagian-bagian jalan dan jembatan wilayah I;
- u. melaksanakan fasilitasi pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
- v. melaksanakan dan mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga Bidang Bina Marga; dan
- w. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah II mempunyai tugas:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan Wilayah II;
- b. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi;
- c. melaksanakan fasilitasi pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi, melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan, melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan di wilayah II;
- d. menyusun rencana teknik dan program kegiatan jalan dan jembatan wilayah II;
- e. menyusun rencana dan program pengembangan serta pembinaan teknik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Jalan dan jembatan wilayah II;
- f. menyusun rumusan rencana kebijakan teknis dan penyusunan program pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan wilayah II;
- h. menyusun dan mengembangkan standar dokumen pengadaan;
- i. melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP Bidang Bina Marga;
- j. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dalam penyusunan program;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- k. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pembangunan jalan dan jembatan wilayah II;
- l. menyesuaikan kontrak pekerjaan konstruksi dan preservasi jalan dan jembatan wilayah II;
- m. menyusun Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang jalan dan jembatan wilayah II;
- n. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi dan audit keselamatan jalan dan jembatan wilayah II;
- o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, jalan bebas hambatan dalam wilayah II Provinsi;
- p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam wilayah II Provinsi;
- q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam wilayah II Provinsi;
- r. melaksanakan preservasi jalan dan jembatan wilayah II;
- s. menyiapkan bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan dan jembatan wilayah II;
- t. melaksanakan pengamanan, pemanfaatan bagian-bagian jalan dan jembatan wilayah II;
- u. melaksanakan fasilitasi pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



v. melaksanakan dan mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga Bidang Bina Marga; dan

w. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 30

Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah III mempunyai tugas:

a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan Wilayah III;

b. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi;

c. melaksanakan fasilitasi pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi, melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan, melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan di wilayah III;

d. menyusun rencana teknik dan program kegiatan jalan dan jembatan wilayah III;

e. menyusun rencana dan program pengembangan serta pembinaan teknik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Jalan dan jembatan wilayah III;

f. menyusun rumusan rencana kebijakan teknis dan penyusunan program pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah III;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan wilayah III;
- h. menyusun dan mengembangkan standar dokumen pengadaan;
- i. melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP Bidang Bina Marga;
- j. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dalam penyusunan program;
- k. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pembangunan jalan dan jembatan wilayah III;
- l. menyesuaikan kontrak pekerjaan konstruksi dan preservasi jalan dan jembatan wilayah III;
- m. menyusun Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria bidang jalan dan jembatan wilayah III;
- n. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi dan audit keselamatan jalan dan jembatan wilayah III;
- o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, jalan bebas hambatan dalam wilayah III Provinsi;
- p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam wilayah III Provinsi;
- q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam wilayah III Provinsi;
- r. melaksanakan preservasi jalan dan jembatan wilayah III;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- s. menyiapkan bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan dan jembatan wilayah III;
- t. melaksanakan pengamanan, pemanfaatan bagian-bagian jalan dan jembatan wilayah III,<sup>45</sup>.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>45</sup> Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah jalan penghubung ibu kota Provinsi dan ibu Kota Kabupaten. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk jalan nasional dan Gubernur untuk jalan Provinsi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Kementerian yang membidangi urusan jalan Provinsi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rafinus selaku kepala seksi penyelenggaran jalan wilayah I mengatakan sebagai berikut:

”Jadi Yang termasuk jalan Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah jalan Provinsi di Suak Kandis-Desa Simpang Berbak dengan panjang 21,066 km, jalan Provinsi di Desa Simpang Berbak-Simpang Jembatan Muara Sabak dengan panjang 45,641 km, jalan Simpang Lagan-Simpang Pelabi 33,200 km totalnya ada sekitar 99,907 km”<sup>46</sup>.

Dari ketiga ruas jalan tersebut, ruas jalan Provinsi Simpang Berbak - Simpang Jembatan Muara Sabak adalah jalan yang masih mengalami kerusakan serta jalan yang belum diperbaiki. Jalan Provinsi yang berada di Tanjung Jabung Timur khususnya dari Muara Sabak-Rantau Rasau masih banyak terjadi kerusakan yang disebabkan oleh muatan yang berlebihan oleh karena itu dibutuhkan perbaikan insfratuktur jalan yang memadai agar kondisi jalan bagus secara merata. Sperti wawancara dengan bapak

<sup>46</sup> Wawancara dengan bapak Rafinus selaku Kepala Seksi Penyelenggaran Jalan Wilayah I, pada tanggal 13 April 2023, pukul 10.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lanjar sebagai masyarakat sekitar yang membantu memperbaiki jalan Provinsi mengatakan sebagai berikut:

“Saya memperbaiki jalan Provinsi yang rusak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur semenjak adanya covid 19 secara suka rela dengan bantuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, saya membantu memperbaiki jalan Provinsi dengan alat seadanya seperti menggunakan cangkul untuk menimbun dan meratakan jalan. namun jika ada jalan yang rusak sangat parah saya menghubungi orang Dinas PUPR agar mengirimkan material seperti batu untuk menimbun jalan tersebut. Saya membantu memperbaiki jalan tersebut dengan suka rela dan ikhlas tidak memungut biaya dari pengguna jalan. Terkadang para supir inisiatif memberikan sebagian rezekinya kepada saya. Adapun fasilitas yang saya dapatkan dari Dinas PUPR yaitu rompi dan topi serta posko untuk tempat istirahat”<sup>47</sup>.

Berdasarkan data tersebut Kondisi jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih memprihatinkan seperti banyaknya lubang pada permukaan jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan yang melintas. Sangat dibutuhkan penanganan untuk kondisi jalan tersebut, akibat dari kerusakan jalan tersebut sering terjadi kemacetan panjang seperti wawancara dengan bapak Wawan sebagai supir PS yang membawa angkutan sawit mengatakan sebagai berikut:

“Jika cuaca sering hujan kemacetan panjang terjadi terus menerus akibat jalan yang licin bahkan tidak sedikit mobil yang terprosook akibat jalan licin tersebut. Sebagai supir ps yang membawa muatan sawit sebanyak 8 ton saya terkendala akibat kemacetan jalan ini yang menyebabkan jarak tempuh menjadi lebih lama serta buah sawit yang ambrol. Dengan begitu sangat menghambat pekerjaan saya, yang

<sup>47</sup> Wawancara dengan bapak Lanjar sebagai masyarakat yang membantu memperbaiki jalan Provinsi, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 09.00 WIB.

aturannya sudah bisa sampai dan pulang harus terkendala karena kerusakan jalan tersebut”<sup>48</sup>.

Dari data tersebut sudah menggambarkan kondisi jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih banyak mengalami kerusakan dan kemacetan di jalan akibat kerusakan jalan tersebut kendaraan menjadi lebih lambat dan boros bahan bakar, sehingga biaya transportasi menjadi lebih mahal. Selain itu waktu perjalanan juga dapat meningkat karena kecepatan kendaraan yang melambat akibat jalan yang tidak mulus. Adapun wawancara dari bapak Rafinus selaku kepala seksi penyelenggaraan jalan wilayah I mengatakan sebagai berikut:

“Kondisi jalan rusak tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu kondisi jalan mantap dan kondisi jalan tidak mantap. Kondisi jalan mantap artinya ruas jalan dengan kondisi baik atau sesuai dengan umur rencana jalan yang diperhitungkan serta mengikuti sesuai standar tertentu. Kondisi jalan tidak mantap adalah gabungan dari kondisi jalan rusak berat dan ringan. Kondisi jalan rusak berat seperti jalan yang dilalui kendaraan dengan kecepatan 0-20 km perjam sedangkan jalan rusak ringan adalah jalan yang bisa dilalui kendaraan 0-40 km perjam”<sup>49</sup>.

Kerusakan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat disebabkan beberapa faktor seperti air, perubahan suhu, cuaca, material konstruksi perkerasan, kondisi tanah yang tidak stabil, proses pemadatan yang di atas lapisan tanah yang kurang baik dan tonase atau muatan kendaraan berat yang melebihi kapasitas dan volume kendaraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>48</sup> Wawancara dengan bapak Wawan sebagai supir PS, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 10.00 WIB.

<sup>49</sup> Wawancara dengan bapak Rafinus selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah I, pada tanggal 13 April 2023, pukul 10.00 WIB.



yang maskin meningkat. Jalan yang baik memperlancar hubungan antara berbagai daerah. Sebaliknya, jalan yang rusak pastinya akan menghambat kegiatan ekonomi dan bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Berikut ini jenis-jenis kerusakan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### 1. Retak

Salah satu faktor terbesar yang menyebabkan keretakan ini adalah buruknya sistem drainase jalan. Sistem drainase ini juga harus mampu mengalirkan air hujan atau air dari sumber lain dan mengendalikan air tanah yang dapat menyebabkan erosi atau longsor. Sistem drainase yang dibangun harus dipelihara dengan baik dan berfungsi dengan baik. Agar sistem drainase tetap mengalirkan air dengan lancar, maka harus rutin dibersihkan dari kotoran dan gulma. Idealnya, pembangunan jalan beraspal harus dibarengi dengan pembangunan sistem drainase. Kalau tidak, bisa dipastikan kerusakan jalan aspal tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, solusinya tidak cukup hanya dengan menambal retakan yang ada. Menurut wawancara dengan bapak Lanjar sebagai masyarakat sekitar yang membantu memperbaiki jalan mengatakan sebagai berikut:

“Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum adanya sistem drainase sehingga ketika adanya lubang, pada saat hujan air tersebut menyumbat didalam lubang yang menyebabkan terganggunya pengguna jalan apalagi di jalan yang mengalami keretakan, kerusakan aspal yang masih menyatu dengan tanah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sehingga menyebabkan jalan terhambat karena adanya genangan air dan jalan yang licin”<sup>50</sup>

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum mempunyai sistem drainase yang baik sehingga air mudah menyumbat menyebabkan terjadinya kerusakan pada lapisan aspal tersebut apalagi ketika lapis pondasi agregat tidak padat akan mudah menyebabkan terjadinya kerusakan jalan. Beban kendaraan yang berat menimbulkan tegangan dan regangan pada setiap lapis perkerasan. Beban kendaraan yang terus melintas akhirnya menyebabkan munculnya retakan. Jika keretakan dibiarkan tidak terkendali, dapat dipastikan bahwa selama musim hujan air akan merembes ke dalam retakan dan mengubah retakan menjadi lubang yang terus membesar. Oleh karena itu, sebaiknya segera dilakukan perbaikan dengan tambalan. Ada pertimbangan penting dalam membangun sistem drainase jalan, antara lain kondisi topografi sepanjang jalan, analisis curah hujan maksimum per tahun pada daerah di atas jalan aspal, hingga menentukan bentuk dan kemiringan yang mempengaruhi aliran air. Sistem drainase harus direncanakan agar tidak mengganggu drainase yang ada.

## 2. Lubang

Pada jalan beraspal, jika retakan dibiarkan tidak diperbaiki, kerusakan berupa lubang dapat terjadi jika air akhirnya merembes masuk sehingga membuat lapisan jalan menjadi rapuh. Lubang yang awalnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>50</sup> Wawancara dengan bapak Lanjar sebagai masyarakat yang membantu memperbaiki jalan Provinsi, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 09.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kecil ini bisa berubah menjadi lubang besar yang bisa membahayakan pengguna jalan. Menurut wawancara dengan bapak Lanjar masyarakat sekitar yang membantu memperbaiki jalan mengatakan sebagai berikut:

“Kerusakan jalan Provinsi yang paling banyak dijumpai yaitu lubang yang bervariasi ada yang kecil dan besar dalam hal ini jika ada jalan yang rusak sudah parah seperti jalan berlubang yang sudah tidak bisa saya atasi saya menghubungi orang yang berada di dinas PUPR Provinsi Jambi agar membawakan batu untuk menimbun jalan tersebut.”<sup>51</sup>.

Dari hasil wawancara dan pengamatan lubang adalah kerusakan yang paling sering ditemukan. Kerusakan ini sangat berbahaya bagi pengguna jalan apalagi jika lubang tersebut tertutup dengan genangan air, pengguna jalan harus lebih berhati-hati serta mengurangi kecepatan saat berkendara.

### 3. Distorsi

Deteriorasi atau deformasi perkerasan aspal dapat terjadi karena tanah dasar yang kurang baik dan pemadatan yang kurang optimal pada lapis pondasi. Kerusakan pada jalan aspal dapat berupa runtuh, ledakan, tikungan dan alur. Kerusakan berupa kerusakan pada jalan aspal tidak cukup diperbaiki hanya dengan penambalan. Memperbaiki kerusakan degradasi cukup kompleks dan memakan waktu lama. Kerusakan pada perkerasan aspal harus diperbaiki dengan mengikis ulang, memadatkan kembali, dan kemudian menambahkan lapisan permukaan baru. Menurut

<sup>51</sup> Wawancara dengan bapak Lanjar sebagai masyarakat yang membantu memperbaiki jalan Provinsi, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 09.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

wawancara dengan bapak Lanjar sebagai masyarakat yang membantu memperbaiki jalan tersebut mengatakan sebagai berikut:

“Jalan provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ini berasal dari tanah merah itulah mengapa kerusakan jalan mudah terjadi karena tanah merah cukup padat sehingga dalam pembangunan infrastuktur jalan mengalami kesulitan itulah mengapa kerusakan jalan Provinsi mudah terjadi karena lapis pondasi tidak padat. Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini pun ada yang belum teraspal sepenuhnya jadi ketika musim hujan jalan akan licin karena tanah merah tersebut”<sup>52</sup>.

Dari data tersebut diketahui bahwa kerusakan jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini penyebab utamanya adalah kondisi tanah yang kurang bagus, itulah mengapa ketika hujan tanah akan licin yang dapat menyebabkan pengguna motor dan mobil kesulitan melewati jalan tersebut dan harus berhati hati agar tidak terjadi kecelakaan. Untuk memperbaiki kerusakan tersebut dengan cara tahap pemadatan dalam proses pembangunan jalan harus dilakukan secara hati-hati. Pemadatan harus dilakukan untuk meningkatkan kekuatan tanah, meminimalkan pengaruh air terhadap tanah dan mengurangi infiltrasi air ke dalam tanah. Langkah kompresi ini dilakukan lapis demi lapis untuk mencapai densitas yang ideal.

#### 4. Pengupasan

Pengelupasan lapisan permukaan dapat terjadi karena tidak adanya ikatan antara substrat jalan dengan lapisan permukaan atau karena lapisan

<sup>52</sup> Wawancara dengan bapak Lanjar sebagai masyarakat yang membantu memperbaiki jalan Provinsi, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 09.00 WIB.

permukaan terlalu tipis. Setiap kerusakan pada perkerasan aspal perlu dicermati sebelum dilakukan tindakan perbaikan agar perbaikan dapat sepenuhnya disesuaikan dengan kerusakan yang terjadi. Dengan pengamatan, perbaikan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Menurut wawancara dengan bapak lanjar sebagai masyarakat yang membantu memperbaiki jalan mengatakan sebagai berikut:

”Jika jalan tersebut sudah terjadi pengelupasan maka saya akan menghubungi pak iwan selaku orang Dinas PUPR untuk mengirimkan alat bantu seperti bulldozer yang digunakan untuk meratakan, menggali dan menimbun tanah”<sup>53</sup>.

Dari hasil pengamatan dan wawancara di atas kondisi jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih banyak mengalami kendala perbaikan jalan. Kerusakan di atas hanya bisa ditangani secara sementara, untuk jalan bisa mulus tersebut perlu dilakukan perbaikan infrastruktur jalan. Kondisi jalan rusak yang menjadi titik penelitian Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengalami kerusakan parah yaitu dari Muara Sabak – Rantau Rasau ada empat titik yang sering mengalami kemacetan panjang yaitu di Kecamatan Muara Sabak Timur yaitu di Desa Siau, dan Desa Lambur 1, Kecamatan Rantau Rasau yaitu di Teluk Serdang dan Desa Harapan Makmur. Berbagai cara sudah dilakukan agar tidak terjadi kemacetan seperti menimbun jalan rusak dengan batu dan meratakan jalan menggunakan alat berat. Namun pada dasarnya jalan Provinsi ini sudah mengalami kerusakan yang tidak bisa ditangani dengan

<sup>53</sup> Wawancara dengan bapak Lanjar sebagai masyarakat yang membantu memperbaiki jalan Provinsi, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 09.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



cara tersebut tetapi harus dilakukan pembangunan infratuktur jalan agar tidak terjadi kerusakan dan kemacetan serta memperlancar akses jalan. Dengan begitu tidak ada lagi pengguna jalan yang mengeluh karena jalan. Mungkin untuk saat ini belum ada pembangunan khusus untuk perbaikan jalan namun disini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat membantu jika ada kerusakan jalan yang parah dengan cara mengirim alat dan bahan tersebut yang dapat digunakan untuk memperbaiki jalan Provinsi yang rusak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun wawancara dengan bapak Ridho selaku Kepala Seksi Penyelenggaran Jalan Wilayah II mengungkapkan sebagai berikut:

“Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada ruas jalan Suak Kandis-Desa Simpang Berbak jalan kondisi baik 2,000 km, kondisi sedang 10,066 km, kondisi rusak ringan 5,600 km dan rusak berat 3,400 km, ruas jalan Simpang Berbak - Simpang Jembatan Muara Sabak jalan kondisi baik 15,400 km, rusak ringan 11,201 km, kondisi sedang 13,040 km, dan rusak berat 6,000 km” sedangkan ruas jalan Sp Lagan-SP Pelabi kondisi jalan baik 18.400 km, kondisi jalan sedang 10.200 km, kondisi jalan rusak ringan 4,400 dan kondisi jalan rusak berat 0,200 km. Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk jalan kelas II yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton”<sup>54</sup>.

<sup>54</sup> Wawancara dengan bapak Ridho selaku Kepala Seski Penyelengaraan Jalan Wilayah II, pada tanggal 18 April 2023, pukul 13.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Tabel 1 Kondisi jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NAMA KABUPATEN / RUAS JALAN	PERANAN	KELAS JALAN	PANJANG	KONDISI (KM)			
			SK. Gubernur (KM)	B	S	RR	RB
<b>B. KABUPATEN TANJAB TIMUR</b>							
- Suak Kandis - Desa Simpang/Berbak	K 2	III B	21,066	2,000	10,066	5,600	3,400
- Desa Simpang/Berbak - Simp. Jembatan Muara Sabak	K 2	III B	45,641	15,400	13,040	11,201	6,000
- Sp. Lagan - Sp. Pelabii/ Zona V	K 2	III B	33,200	18,400	10,200	4,400	0,200
<b>SUB JUMLAH</b>			<b>99,907</b>	<b>35,800</b>	<b>33,306</b>	<b>21,201</b>	<b>9,600</b>

Berdasarkan Tabel 1 kondisi ruas Jalan Suak Kandis-Desa Simpang Berbak mengalami kerusakan dengan panjang 3,400 km, ruas jalan Simpang Lagan- Simpang Pelabi Zona V hanya ada sedikit kerusakan dengan panjang 0,200 km sedangkan ruas jalan yang mengalami rusak berat terburuk berada pada ruas jalan Simpang Berbak - Simpang Jembatan Muara Sabak dengan panjang 6,00 km<sup>55</sup>. berdasarkan wawancara dengan bapak Ridho selaku kepala seksi penyelenggaraan jalan wilayah II mengatakan sebagai berikut:

”Di tahun ini kita mempunyai target untuk meningkatkan kondisi jalan tersebut dari rusak berat dan ringan menjadi baik sesuai dengan (RPJMD) rencana pembangunan jangka menengah daerah”<sup>56</sup>.

Bedasarkan hasil wawancara dan pengamatan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung timur pada ruas jalan Simpang Berbak- Simpang Jembatan Muara Sabak masih banyak kondisi jalan dengan keadaan rusak berat yang perlu dilakukan penanganan secara khusus serta pemeliharaan insfratuktur jalan. Kondisi jalan tersebut sangat berdampak

<sup>55</sup> Kondisi jalan menurut Sk Gubernur, dokumentasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada tgl 18 April 2023.

<sup>56</sup> Wawancara dengan bapak Ridho selaku Kepala Seski Penyelenggaraan Jalan Wilayah II, pada tanggal 18 April 2023, pukul 13.00 WIB.

pada kendaraan-kendaraan yang melintas di jalan dan tidak sedikit kendaraan roda dua dan roda empat mengalami kecelakaan di jalan tersebut. Jalan provinsi tersebut termasuk jalan umum yang digunakan para pengguna roda dua maupun roda empat untuk mencapai tempat tujuan. Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan jalur yang penting untuk menunjang segala kebutuhan manusia baik itu kegiatan perekonomian maupun sosial masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari kerusakan jalan tersebut seperti meningkatnya biaya transportasi dan membuat kendaraan menjadi lebih lambat serta boros bahan bakar, sehingga biaya transportasi menjadi lebih mahal, selain itu perjalanan memakan waktu tempuh menjadi lebih lama karena kecepatan kendaraan menjadi lambat akibat jalan yang tidak mulus. Dampak lain yang tidak kalah penting seperti menurunnya daya saing ekonomi jalan yang rusak membuat sulitnya mengirim barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga meningkatkan biaya logistik dan menurunkan keuntungan bagi pelaku ekonomi yang dapat menyebabkan terhambatnya perekonomian pada wilayah tersebut.

## **B. Implementasi kebijakan Pemerintah dalam perbaikan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





berbagai kepentingan. Penelitian ini menggunakan kebijakan publik yang merupakan bentuk intervensi pemerintah menyelesaikan masalah masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini Tachyan menyimpulkan bahwa kebijakan publik secara umum terdiri dari tiga hal pokok: perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan publik.

#### 1. Perumusan Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan adalah pengembangan kebijakan yang efektif dan dapat diterima untuk mengatasi masalah apa yang telah ditempatkan dalam agenda kebijakan. Perumusan kebijakan publik harus melalui proses tahapannya. Perumusan kebijakan meliputi definisi sasaran yaitu yang akan di capai melalui kebijakan serta pertimbangan pertimbangan terhadap sejumlah alternatif yang berbeda. Jadi dalam pembangunan jalan harus diperlukan perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan terjadi setiap waktu atau priode tertentu. Dalam hal ini kebijakan menggunakan terknik perumusan rutin yaitu keputusan gubernur jambi no 216/ kep.gub/dpupr 2018 tentang penetapan ruas jalan menurut stautusnya sebagai jalan provinsi. Masa berlaku kebijakan tersebut lima tahun. Prosesnya perumusannya terjadi berulang kali selama lima tahun sekali. Bentuk dan isi kebijakan ini secara umum sama pada setiap priode, perbedaannya terletak pada besaran angka dalam mata anggaran. Adapun perumusan kebijakan yang ditanda tangani oleh Gubernur Jambi sperti ruas jalan Provinsi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1. Suak Kandis- Desa Simpang Berbak dengan panjang 21.066 km.
2. Desa Simpang Berbak - Simp Jembatan Muara Sabak dengan panjang 45.641. km.
3. Simpang Lagan- Simpang Pelabi dengan panjang 33.200 km<sup>57</sup>.

Data di atas adalah data yang di ambil dari Surat Keputusan Gubernur Jambi tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Provinsi. Dari data ini peneliti dapat mengetahui yang mana saja yang termasuk jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bagaimana penerapannya di lapangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penelikan Jalan pasal 06 ayat (03) penanganan pemeliharaan jalan penanganan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan secara preventif dan reaktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (02) bertujuan untuk membatasi jenis, tingkat, sebaran kerusakan, dan menunda kerusakan lebih lanjut serta mengurangi jumlah kegiatan pemeliharaan rutin, melindungi perkerasan dari pengaruh beban dan lingkungan, dan mempertahankan kondisi jalan dalam tingkatan baik dan sedang sesuai dengan rencana<sup>58</sup>.

Adapun pembangunan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ruas jalan Desa Simpang Berbak - Simp Jembatan Muara Sabak dengan panjang 45.641. km. Mengacu pada RENSTRA (rencana

<sup>57</sup> SK gubernur jambi no 216/ kep.gub/dpupr 2018 tentang penetapan ruas jalan menurut stautusnya sebagai jalan provinsi.

<sup>58</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penelikan Jalan nomor 13/PRT/M/2011 pasal (06).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



strategis) tahun 2021-2026. Sperti wawancara dengan bapak rafinus selaku kepala seksi penyelenggaraan jalan wilayah I mengatakan sebagai berikut :

“Pembangunan Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ruas jalan Desa Simpang Berbak - Simp Jembatan Muara Sabak sesuai dengan RENSTRA tahun 2021-2026 yaitu penanganan jalan kita perkeras rigid payment dan dimulai pada bulan April dengan anggaran Pendapatan Asli Daerah”<sup>59</sup>.

Dari hasil wawancara dan pengamatan ruas jalan yang peneliti teliti sudah mulai dilakukan perbaikan dimulai pada bulan april dengan menggunakan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Muara Sabak Timur. Pembangunan jalan ini dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan Renstra Dinas PUPR tahun 2021-2026.

## 2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan pemerintah baik individu maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan. Sementara itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Implementasi kebijakan pada jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum sepenuhnya

<sup>59</sup> Wawancara dengan bapak Rafinus selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah I, pada tanggal 13 April 2023, pukul 10.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terrealisasikan karena kurangnya dana anggaran. Sperti wawancara dengan bapak Rafinus Kepala Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah I sebagai berikut:

“Lebar jalan Provinsi pada umumnya 6 cm namun masih ada yang 4,5 cm jadi disamping memperbaiki jalan yang rusak kita juga secara bertahap melebarkan jalan sesuai standar jalan provinsi yaitu 6 cm<sup>60</sup>”.

Pernyataan tersebut di dukung oleh wawancara dengan bapak Ridho kepala seksi penyelenggaraan jalan wilayah II sebagai berikut:

”Jalan Provinsi bervariasi dari 4,5 cm – 6 cm jadi target kita selain memperbaiki kondisi jalan dari rusak berat dan ringan menjadi baik, kita juga melebarkan jalan sesuai menuju standar serta meningkatkan kondisi jalan sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah)<sup>61</sup>”.

Selain pernyataan diatas adapun implementasi kebijakan pemerintah terhadap ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah serta kemacetan dilakukan penanganan pertama yaitu dengan mengirimkan material dan alat berat. Sperti wawancara dengan Bapak Thias selaku Kepala Seksi Bidang Bina Program mengatakan sebagai berikut:

“Jadi di Dinas PUPR ini ada namanya (ALKAL) yaitu peralatan dan perbekalan dalam unit pelaksanaan teknis (UPT) bidang bina marga, jadi penanganan jika ada kemacetan mereka dikirim untuk membantu sampai jalan berfungsi terlebih dahulu, Alkal turun karena adanya respon masyarakat. Alat berat yang diturunkan sperti ekskavator mini, bulldoser dan bahan material. Namun alkal tersebut hanya digunakan untuk penanganan ruas kritis agar jalan berfungsi terlebih dahulu,

<sup>60</sup> Wawancara dengan bapak Rafinus selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah I, pada tanggal 13 April 2023, pukul 10.00 WIB.

<sup>61</sup> Wawancara dengan bapak Ridho Kepala Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah II, pada tanggal 18 April 2023, Pukul 13.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



untuk sampai ke tahap pengaspalan itu perlu proses yang panjang dan tidak bisa langsung dilakukan”<sup>62</sup>.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan wawancara dari bapak Lanjar sebagai masyarakat sekitar yang membantu memperbaiki jalan mengatakan sebagai berikut:

“Jika ada jalan yang rusak sudah parah seperti jalan berlubang yang sudah tidak bisa saya atasi saya menghubungi bapak Iwan yang berada di Dinas PUPR Provinsi Jambi agar mengirimkan batu untuk menimbun jalan tersebut. saya foto terlebih dahulu jalan yang rusak tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada orang Dinas PUPR jika dilihat sudah sangat parah dari Dinas PUPR tersebut akan mengirimkan batu tersebut sesuai kebutuhan kadang satu mobil truck bahkan bisa lebih tergantung kerusakan jalan tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengirimkan bantuan ketika jalan sudah rusak parah dan terjadi kemacetan panjang dan berhari hari yaitu dengan menurunkan alat berat dan beberapa orang pekerja dari Dinas PUPR untuk membantu menangani kerusakan jalan tersebut”<sup>63</sup>.

Dari hasil pengamatan dan wawancara tersebut diketahui bahwa implementasi kebijakan pemerintah terhadap perbaikan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada ruas jalan yang diteliti cukup memadai adapun penanganan yang dilakukan sementara seperti mengirimkan bahan material dan alat berat untuk membantu agar jalan dapat berfungsi terlebih dulu agar tidak terjadi kemacetan serta mobil terprosok. Namun untuk perbaikan jalan secara khusus itu harus melalui proses yang panjang terlebih dahulu. Keterbatasan anggaran menjadi salah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Thias Sebagai Kepala Seksi Bina Program, pada tanggal 18 April 2023, pukul 14.00 WIB.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Lanjar sebagai masyarakat yang membantu memperbaiki jalan Provinsi, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 09.00 WIB.

satu faktor mengapa Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami keterlambatan pembangunan.

### 3 Pemantauan Dan Evaluasi Implementasi Kebijakan

Pemantauan yaitu tempat untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan dan manfaat kebijakan. Evaluasi adalah adalah proses untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknik pelaksanaan yang telah ditentukan. Proses evaluasi dilakukan dengan membandingkan implementasi kebijakan dengan standar yang telah ditetapkan atau dengan membandingkan implementasi kebijakan dengan kondisi lokal. Pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam Jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Adapun wawancara dengan bapak Thias Kepala Seksi Bidang Bina Program mengatakan sebagai berikut:

“Pembangunan jalan di mulai dengan perencanaan contohnya jika ada jalan yang rusak parah harus di sesuaikan dengan pagu anggaran yang sudah ada. Tahapan pengerjaan jalan dimulai dengan tender yang ada di ULP (unit layanan pengadaan)”<sup>64</sup>.

Namun pada tahun 2023 ini akan dilakukan perbaikan dan pembangunan di jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sperti wawancara dengan bapak Rafinus kepala seksi penyelenggaraan jalan wilayah I mengatakan sebagai berikut:

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Thias Sebagai Kepala Seksi Bina Program, pada tanggal 18 April 2023, pukul 14.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Rencana perbaikan jalan ditahun ini yaitu di satu ruas jalan Desa Simpang Muara Sabak–Desa Simpang Berbak dengan dana anggaran pendapatan belanja daerah murni yaitu 9 milyar dan adapun dana alokasi khusus dari pusat yang ditransfer ke daerah yaitu 20 milyar jadi total nya 29 milyar dana anggaran yang akan digunakan untuk perbaikan jalan. Perbaikan jalan sudah mulai dilakukan di simpang jembatan Muara Sabak yang dimulai pada bulan April dengan masa pembangunan selama 7 bulan”<sup>65</sup>.

Adapun pernyataan dari bapak Ridho kepala seksi penyelenggaraan jalan wilayah II mengatakan sebagai berikut:

“Rencana pembangunan jalan desa Simpang Muara Sabak – Desa Simpang Berbak menggunakan DAK (dana alokasi khusus) sebanyak 20 milyar dan dana APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) sebanyak 9 milyar. Adapun pembangunan baru untuk akses sungai rambut ujung jabung dengan dana 5 milyar. Saat ini sudah mulai dilakukan pembangunan di ruas jalan Simpang Berbak-Simpang jembatan Muara Sabak”<sup>66</sup>.

Dari hasil wawancara di atas bahwa sudah mulai dilakukan perbaikan jalan pada ruas jalan yang peneliti teliti. Namun pembangunan tersebut belum menyeluruh dilakukan diruas jalan yang diteliti karena adanya keterbatasan dana. Saat ini perbaikan jalan sudah dimulai di simpang jembatan Muara Sabak yaitu dengan menyesuaikan RENSTRA tahun 2021-2026. RENSTRA memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada rancangan program jangka menengah daerah (RPJMD). Keterlambatan dana anggaran tersebut menjadi dampak yang negatif bagi

<sup>65</sup> Wawancara dengan bapak Ridho Kepala Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah II, Pada tanggal 18 April 2023, Pukul 13.00 WIB.

<sup>66</sup> Wawancara dengan bapak Ridho Kepala Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah II, Pada tanggal 18 April 2023, pukul 13.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



masyarakat sekitar karena jalan di gunakan untuk menunjang kebutuhan manusia dengan jalan rusak tersebut aktifitas masyarakat akan terhambat. Pembangunan insfratuktur jalan Provinsi diruas jalan Simpang Berbak-Jembatan Muara Sabak yang mengalami kerusakan signifikan akan segera dilakukan. Dalam pelaksanaan alokasi dana anggaran Pemerintah menggunakan anggaran pendapatan daerah (APBD) untuk melakukan pembangunan disuatu daerah. Dana APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyrakat di suatu daerah. Selain itu adapun pembangunan jalan provinsi menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu alokasi dari dana alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Provinsi atau Kabupaten dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai prioritas nasional.

### **C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Perbaikan Jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

#### 1. Faktor pendukung

Berkaitan dengan kondisi jalan eksternal dan internal yang ada, Kondisi internal berkaitan dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan anggaran pemerintah. Dan faktor pendukung dalam pelaksanaan dan pembangunan infrastuktur jalan eksternal sperti peran dan dukungan dari pemerintah serta masukan masyarakat.

##### a. Motivasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Untuk meningkatkan semangat kinerja dari staf Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat petugas pengawas dan petugas pelaksana pemerintah perlu melakukan motivasi dan dorongan kerja, hal tersebut agar pekerjaan dapat berlangsung dengan maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti wawancara dengan bapak Thias Selaku kepala seksi bidang bina program mengatakan sebagai berikut:

“Jika terjadi kemacetan di Jalan kami menurunkan beberapa orang Dinas PUPR dari bagian UPT ALKAL untuk membantu memperbaiki jalan tersebut sampai jalan itu berfungsi terlebih dahulu agar kemacetan berhenti, kami juga membantu mobil” yang terprosoak agar bisa melanjutkan perjalanannya<sup>67</sup>.

Dinas PUPR akan turun langsung ke lapangan ketika sudah melihat respon dari masyarakat mengenai kerusakan jalan tersebut yaitu dengan mengirimkan bahan material dan alat berat untuk membantu kemacetan yang terjadi. Adapun wawancara dengan bapak Thias kepala seksi bidang bina program mengatakan sebagai berikut:

“Pemerintah melihat usulan masyarakat tersebut melalui musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi dari situ pemerintah melihat mana jalan yang paling memerlukan perbaikan agar segera ditinjau dan melakukan perencanaan pembangunan<sup>68</sup>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Thias Sebagai Kepala Seksi Bina Program, pada tanggal 18 April 2023, pukul 14.00 WIB.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Thias Sebagai Kepala Seksi Bina Program, pada tanggal 18 April 2023, pukul 14.00 WIB.

Dari wawancara di atas Pemerintah melihat usulan dari masyarakat mengenai perbaikan jalan tersebut. Masyarakat harus aktif dalam memberikan usulan melalui musrenbang untuk mendorong pemerintah melakukan perbaikan jalan. Namun pada dasarnya pembangunan jalan tidak bisa dilakukan secara langsung namun melalui proses yang panjang untuk sampai pada tahap pembangunan.

b. Partisipasi masyarakat

Sikap dan respon masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur perbaikan jalan Provinsi di kabupaten tanjung jabung timur berdasarkan hasil penelitian masyarakat sangat mendukung perbaikan jalan tersebut. Seperti wawancara dengan bapak lanjar sebagai masyarakat yang membantu memperbaiki jalan tersebut mengatakan sebagai berikut:

“Saya memperbaiki jalan tersebut dengan suka rela dengan bantuan Dinas PUPR dengan memfasilitasi saya baju dan topi pada saat bekerja serta alat dan bahan material yang akan dikirim ketika ada kemacetan untuk membantu perbaikan jalan tersebut, saya tidak meminta imbalan kepada pengguna jalan yang lewat namun terkadang para supir ada yang memberi saya uang sebagai ucapan terima kasih. Jika ada mobil yang terprosook saya membantu mobil tersebut agak bisa keluar dari lubang jalan dengan cara mencari batang pinang untuk mengganjal ban mobil tersebut selain itu supir mobil yang lain pun ikut membantu mendorong mobil tersebut agar cepat keluar dari lubang jalan agar mobil lain dapat lewat”<sup>69</sup>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>69</sup> Wawancara dengan bapak Lanjar sebagai masyarakat yang membantu memperbaiki jalan Provinsi, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 09.00 WIB.

Dari wawancara di atas partisipasi masyarakat sangat mendukung seperti dari Pengguna jalan yang melewati jalan tersebut juga tidak lupa untuk memberikan sedikit rezekinya untuk masyarakat yang suka rela membantu memperbaiki jalan tersebut. Karena pada saat terjadi hujan, jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kerusakan parah sampai kemacetan dan antrian panjang bahkan banyak mobil terprosook. Menurut wawancara dengan bapak Iman supir ps yang membawa angkutan sawit mengatakan sebagai berikut:

“Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini harus segera dilakukan perbaikan agar kami selaku para supir lebih cepat sampai tujuan tanpa ada hambatan. Akibat dari buruknya jalan tersebut mobil saya sering terprosook masuk ke lubang bahkan pernah sampai berhari hari, jika mobil saya terpuruk biasanya saya meminta bantuan dari teman supir yang lain agar dapat keluar dari lubang tersebut, dengan cara ditarik dengan tali menggunakan mobil lain dan dibantu dengan di dorong”<sup>70</sup>.

Dari wawancara di atas partisipasi masyarakat terhadap perbaikan jalan tersebut sangat besar. Mereka berharap jalan tersebut segera diperbaiki agar tidak ada mobil yang terprosook dan menghambat aktivitas serta memperlambat perekonomian. Adapun wawancara dengan bapak Jay sebagai supir travel mengatakan sebagai berikut:

“Jalan provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini harus segera dilakukan perbaikan dari semua kerusakan agar tidak ada

<sup>70</sup> Wawancara dengan bapak Iman selaku supir mobil, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 10.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



lagi penumpang saya yang mengeluh dari Rantau Rasau-Jambi atau dari Jambi-Rantau Rasau itu biasanya hanya memerlukan waktu kurang lebih 3 jam dan jika ada kemacetan membuat jarak tempuh menjadi lebih lama penumpang saya ketinggalan untuk mengejar urusannya”<sup>71</sup>.

Selain itu adapun wawancara dengan bapak Dayat sebagai pengguna motor sebagai berikut:

“Saya sering melakukan perjalanan dari Rantau Rasau-Sabak karena pekerjaan saya di Sabak dan rumah saya di Rantau Rasau karena jalan ini masih banyak kerusakan bahkan sering terjadi kemacetan maka dari itu pada saat jalan sedang rusak parah dan macet saya kadang tidak pulang ke rumah kerena jika pulang kerumah hanya bikin capek di jalan apalagi waktu libur saya dirumah hanya dua hari, saya berharap jalan tersebut bisa segera diperbaiki”<sup>72</sup>.

Dari hasil wawancara di atas banyak sekali dukungan dari masyarakat untuk segera dilakukan perbaikan jalan. Pengguna jalan sangat berharap agar jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu diperbaiki secara merata apalagi pada titik jalan yang sering mengalami kemacetan panjang, karena dari dampak kemacetan tersebut bukan hanya terhambatnya pemasukan ekonomi tapi berdampak pada masyarakat yang hal mencapai pekerjaannya. Jika jalan Provinsi tersebut sudah rata dilakukan perbaikan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat. Dan pengguna jalan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik tanpa ada hambatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>71</sup> Wawancara dengan bapak Jay selaku supir Travel, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 10.00 WIB.

<sup>72</sup> Wawancara dengan bapak Dayat selaku pengendara motor, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 11.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 2. Faktor penghambat

Dalam pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan Provinsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat kendala yang menyebabkan terhambatnya pembangunan kendala tersebut seperti keterbatasan sarana prasarana, kondisi geografis dan keterbatasan anggaran. Berdasarkan pendapat di atas terdapat beberapa hal penghambat perbaikan jalan provinsi di kabupaten tanjung jabung timur yaitu

### 1. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan perbaikan jalan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung proses pelaksanaan perbaikan seperti yang dikatakan bapak Ridho kepala seksi bidang bina program mengatakan sebagai berikut:

“Perbaikan jalan Provinsi terkendala dengan keterbatasan alat di alkas karena jalan Provinsi Jambi itu 1032 km, alat tersebut terbagi di beberapa ruas jalan yang ada di sebelas Kabupaten yang sedang mengalami kerusakan jalan”<sup>73</sup>.

Dari data di atas selain keterbatasan anggaran perbaikan jalan Provinsi juga ada keterbatasan alat karena alat yang dipakai tersebut bukan hanya untuk jalan Provinsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun untuk seluruh jalan di Kabupaten lain yang sedang mengalami kerusakan di jalan Provinsi Jambi.

<sup>73</sup> Wawancara dengan bapak Ridho Kepala Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah II, Pada tanggal 18 April 2023, pukul 13.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 2. Kondisi Geografis

Kondisi geografis yaitu kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Sperti wawancara dengan bapak Rafinus kepala seksi penyelenggaraan jalan wilayah I mengatakan sebagai berikut:

“Pada umumnya tanah di jalan Provinsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu tanah lunak yang ditimbun dan dipadatkan yang karena dulunya adalah jalan lingkungan itulah mengapa tidak mudah untuk memperbaiki jalan tersebut karena ada tahapan tersendiri untuk pengerjaannya. Jika ada jalan yang rusak dan banyak lumpur kita buang lumpur tersebut dan diganti dengan tanah pilihan setelah diganti dan dipadatkan baru kita hampar agregat kelas b setelah itu baru di aspal namun pada umumnya di jalan provinsi kabupaten tanjung jabung timur itu memakai rigid beton dan tidak sampai kelas b. jadi tanah timbunan di cor untuk lapisannya 10 cm ketebalannya setelah lapis pondasinya baru di cor lagi lapis perkerasannya sekitar 27 cm pada umumnya jalan provinsi di kabupaten tanjung jabung timur ini menggunakan rigid beton karena daerah rawa tanah dasarnya kurang bagus<sup>74</sup>.

Dari hasil wawancara di atas kondisi geografi menjadi salah satu terhambatnya perbaikan jalan karena rusaknya yang sangat parah memerlukan biaya yang besar. Tanah yang teksturnya lunak tersebut itu juga yang menjadi salah satu penyebab dari rusaknya jalan ketika hujan terus menurut sehingga jalan tersebut mengikis dan menyebabkan kerusakan semakin parah. Perbaikan

<sup>74</sup> Wawancara dengan bapak Rafinus selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah I, pada tanggal 13 April 2023, pukul 10.00 WIB.

jalan tersebut pun sudah dilakukan di beberapa titik namun belum merata.

### 3. Anggaran Pelaksanaan

Terbatasnya anggaran pelaksanaan menjadi faktor utama dalam pelaksanaan perbaikan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti wawancara dengan pak Rafinus kepala seksi penyelenggaraan jalan wilayah I mengatakan sebagai berikut:

“Kami melokasikan dana anggaran setiap tahun sesuai kemampuan keuangan karna yang ditangani oleh dinas PUPR bukan hanya jalan provinsi di kabupaten Tanjung Jabung Timur tapi seluruh kabupaten yang ada di provinsi Jambi jadi ada sebelas kabupaten yang kita tangani. Anggaran tidak kita tangani secara keseluruhan tapi bertahap dengan kemampuan keuangan dengan memprioritaskan jalan yang sangat memerlukan perbaikan”<sup>75</sup>.

Adapun wawancara dengan bapak Ridho kepala seksi penyelenggaraan jalan wilayah II mengatakan sebagai berikut:

“Terbatasnya anggaran menjadi penghambat dinas PUPR untuk melaksanakan perbaikan jalan karena anggaran tersebut harus disesuaikan dengan keadaan lapangan yang lebih membutuhkan perbaikan”<sup>76</sup>.

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa anggaran untuk perbaikan jalan masih terbatas itulah mengapa masih banyaknya jalan yang rusak dan jalan yang memerlukan perbaikan, karena perbaikan jalan ini tidak bisa ditangani sekaligus tapi harus memperhatikan anggaran yang tersedia. Anggaran tersebut terbagi dengan sebelas Kabupaten karena kerusakan jalan Provinsi tidak

<sup>75</sup> Wawancara dengan bapak Rafinus selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah I, pada tanggal 13 April 2023, pukul 10.00 WIB.

<sup>76</sup> Wawancara dengan bapak Ridho Kepala Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah II, tanggal 18 April 2023, pukul 13.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



hanya terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun juga di Kabupaten lain.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di jalan provinsi kabupaten tanjung jabung timur selama dilapangan dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih banyak mengalami kerusakan, kerusakan tersebut terjadi karena faktor seperti air, perubahan suhu, cuaca, material konstruksi perkerasan, kondisi tanah yang tidak stabil, proses pemadatan yang diatas lapisan tanah yang kurang baik dan tonase atau muatan kendaraan berat yang melebihi kapasitas dan volume kendaraan yang makin meningkat. Jalan yang baik memperlancar hubungan antara berbagai daerah. Sebaliknya, jalan yang rusak pastinya akan menghambat kegiatan ekonomi dan bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbaikan Jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur cukup memadai namun terkendala oleh keterbatasan anggaran. Adapun perbaikan jalan pada tahun ini di ruas jalan Simpang Berbak- Simpang Jembatan Muara Sabak dengan dana anggaran pendapatan belanja daerah murni yaitu 9 miliar dan adapun dana alokasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

husus dari pusat yang ditransfer ke daerah yaitu 20 miliar jadi total nya 29 miliar dana anggaran yang akan digunakan untuk perbaikan jalan.

3. Faktor pendukung dan penghambat perbaikan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu

- a. Faktor pendukung yaitu banyaknya respon masyarakat yang berharap untuk segera dilakukan perbaikan jalan karena kerusakan jalan tersebut sangat berdampak negatif bagi masyarakat. Dalam kegiatan perekonomian maupun sosial masyarakat.
- b. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperbaiki jalan tersebut serta keterbatasan anggaran menjadi kendala terbesar dalam perbaikan jalan tersebut.

### B. Saran

Setelah penulis menguraikan dari pembahasan kemudian menarik kesimpulan melalui tulisan ini penulis mengajukan saran yang perlu diperhatikan berkenaan dengan perbaikan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1. Pemerintah hendaknya segera mengupayakan perbaikan jalan di jalan Provinsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur terutama pada jalan mengalami kerusakan.
2. Pemerintah harus lebih berkontribusi melakukan pemeliharaan jalan Provinsi khususnya jalan yang sering terjadi kemacetan.
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat harus lebih cepat tanggap jika terjadi kemacetan di jalan Provinsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Angki Aulia Muhammad, 2013. *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat*, Universitas Pendidikan Indonesia.

Budi Winarno, 2017. *"Kebijakan Publik : Teori Dan Proses"*. Yogyakarta: Media Press Indonesia., Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University.

Dunn. William N., 2003, *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University.

Jurnal Andik Setawan, 2015. *"Politik Anggaran : Kebijakan Dana Bagi Hasil Migas Dalam Apbd"* Kab Bojonegoro.

Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Munggarani, Nurrela Arifah Dan Wibowo Andreas, 2017. *"Kajian Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Dini Perkerasan Jalan Lentur Dan Pengaruhnya Terhadap Biaya Penanganan"* Dalam Jurnal Infrastruktur Vol 3, Parahyangan: Universitas Katolik Parahyangan.

Nss, Rr Lulus Prapti, Edy Suryawardana, and Dian Triyani. *"Analisis dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat di Kota Semarang."* Jurnal Dinamika Sosial Budaya 17.1 (2015): 82-103.

Larasati, Ukhti Ikhsani, and Much Aziz Muslim. *"Penyajian Data Komoditi Batik Kabupaten Sukoharjo dengan Google Earth."* JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika) 2.2 (2016): 152-154.

Sayuti Una, 2012. *"Pedoman Penulisan Skripsi"*. Jambi Fakultas Syariah Iain Sts Jambi.

Subadi, 2006. *"Metode Penelitian Kualitatif"*. Surakarta Muhamadiyah University Press

Sugiono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cv.

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.

### B. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang N0 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

#### C. Internet

<https://nissan.co.id/artikel/artikel-product-centric/sudah-paham-dengan-status-jalan-di-indonesia.html> Diakses pada tgl 5 Oktober 2022 Jam 09:00.

<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/10854/BAB1.pdf?sequence=5&isAllowed=y> Diakses pada tgl 15 Mei 2022 Jam 19.00.

<https://ampkompascom.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/properti/read/2022/04/07/170000221/mudik-ke-jambi-begini-kualitas-jalan-nasional-menuju-muara-sabak?> Diakses 4 November 2022 Jam 09.00.

<https://jambi.antaranewscom.cdn.ampproject.org/v/s/jambi.antaranews.com/amp/berita/327747/melintasi-jalan-jambi-muarasabak-bisa-sedikit> Di akses 6 November 2022 Jam 10.

#### D. Lain lain

Hasil Wawancara Pada Narasumber Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Sekitar Di Jalan Provinsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hasil Wawancara Dengan Pengguna Jalan Provinsi Dikabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-2207/D.II.1/PP.00.11/3/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 29 Maret 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Putri Jayanti**  
NIM : 105190026  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : **Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbaikan Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.**

Lokasi Penelitian : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi  
Waktu Penelitian : 29 Maret 2023 – 29 Juni 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr. Wb*



An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
**Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.**  
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Daftar Informan

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Bapak Rafinus	Kepala Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah I Dinas PUPR Provinsi Jambi
2	Bapak Ridho	Kepala Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah II Dinas PUPR Provinsi Jambi
3	Bapak Thias	Kepala Seksi Bidang Bina Program Dinas PUPR Provinsi Jambi
4	Bapak Lanjar	Masyarakat Sekitar yang membantu memperbaiki Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5	Bapak Iman	Supir Ps
6	Bapak Wawan	Supir mobil
7	Bapak Jay	Supir Travel
8	Bapak Dayat	Pengguna Motor

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak Cipta Milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

## Instrumen Pengumpulan Data

Pertanyaan untuk Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

- Bagaimana kondisi jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
- Bagaimana kebijakan Pemerintah terhadap perbaikan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
- Apa saja kendala dalam perbaikan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
- Bagaimana cara mengatasi jika terjadi kemacetan?
- Apa saja faktor pendukung perbaikan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
- Apa saja kendala dalam perbaikan jalan Provinsi di Tanjung Jabung Timur?
- Bagaimana proses pengerjaan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
- Alat apa saja yang digunakan dalam perbaikan jalan tersebut?
- Apakah ada rencana perbaikan jalan pada tahun ini?
- Berapakah dana anggaran yang di gunakan pada perbaikan jalan di tahun ini?

Pertanyaan untuk masyarakat yang membantu memperbaiki jalan

- Bagaimana kondisi jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
- Bagaimana cara mengatasi kerusakan jalan tersebut?
- Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kerusakan jalan tersebut?
- Apa saja faktor penyebab kerusakan jalan tersebut?
- Apa harapan masyarakat kepada Pemerintah terhadap kerusakan jalan tersebut?
- Apa saja dampak dari kerusakan jalan tersebut?
- Bagaimana kebijakan dari pemerintah terhadap kerusakan jalan tersebut?
- Apa yang dilakukan jika terjadi kemacetan panjang?
- Motivasi bapak membantu memperbaiki jalan tersebut?
- Alat apa yang di pakai untuk memperbaiki jalan tersebut?

Pertanyaan untuk pengguna jalan

- Muatan apa yang dibawa?
- Berapa ton muatan yang dibawa?
- Tanggapan bapak terhadap kerusakan jalan ini?
- Apa harapan untuk pemerintah terhadap kerusakan jalan ini?
- Apa saja dampak dari kerusakan jalan ini?
- Apa yang dilakukan jika terjadi kemacetan panjang?
- Berapa jarak tempuh yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat tujuan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



## DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Bapak Rafinus Selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah I Dinas Pupr Provinsi Jambi Pada Tanggal 13 April 2023.



Wawancara Dengan Bapak Ridho Selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah Ii Dinas Pupr Provinsi Jambi Pada Tanggal 18 April 2023.



Wawancara Dengan Bapak Thias Selaku Kepala Seksi Bidang Bina Program Di Dinas Pupr Provinsi Jambi Pada Tanggal 18 April 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Wawancara Bersama Masyarakat Sekitar Yang Membantu Memperbaiki Jalan Dan Wawancara Dengan Pengguna Jalan di Jalan Provinsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada ruas jalan Simpang Berbak-Simpang Jembatan Muara Sabak pada tanggal 5 Mei 2023.



## Jenis Jenis Kerusakan Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada ruas jalan Simpang Berbak-Simpang Jembatan Muara Sabak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

## CURRICULUM VITAE

### A. INFORMASI DATA DIRI

**Nama** : Putri Jayanti  
**Nim** : 105190026  
**Tempat/tgl. Lahir** : Rantau Rasau, 13 Maret 2001  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Alamat Asal** : Desa Bandar Jaya, Kec.  
Rantau Rasau, Kab.  
Tanjung Jabung Timur, Prov.  
Jambi  
**Alamat Sekarang** : Perumahan Auduri 1 Blok E  
No. 95 kec Telanai Pura Kota  
Jambi  
**Nama/Pekerjaan Ayah** : Jahroman/ Wiraswasta  
**Nama/Pekerjaan Ibu** : Dian Kasiti/ IRT



### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD. N 210/10 Bandar Jaya 2007-2013  
SMPN 2 Tanjab Timur 2013-2016  
SMAN 1 Tanjab Timur 2016-2019  
UIN STS Jambi 2019- 2023

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota PMII 2019- Sekarang  
2. BPH Ikatan Mahasiswa Rantau Rasau (IMARRA) 2022- Sekarang  
3. Badan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan (BPH HMP-IP) 2020- 2021.